

Asisten Deputi Bidang Perhubungan
Kedeputan Bidang Kemaritiman

LAPORAN KINERJA 2019



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



Halaman ini kosong

Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini juga disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj disusun untuk menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2019 beserta realisasinya.

Selama tahun 2019, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* serta menjadi pemicu bagi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Jakarta, April 2020
Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Hennie Ambar Susilowati

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ringkasan Eksekutif	vi
PENDAHULUAN.....	- 1 -
1. Penjelasan Umum.....	- 1 -
2. Aspek Strategis	- 2 -
3. Struktur Organisasi	- 7 -
4. Analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT).....	- 11 -
PERENCANAAN KINERJA	- 14 -
1. Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan	- 14 -
2. Uraian Perjanjian Kinerja (PK)	- 15 -
AKUNTABILITAS KINERJA.....	- 20 -
1. Capaian Kinerja.....	- 21 -
a. Contoh Rancangan Rekomendasi Kebijakan Atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perhubungan.....	- 26 -
b. Contoh Rancangan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan.....	- 34 -
c. Contoh Rancangan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, dan/atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan.....	- 37 -
2. Akuntabilitas Keuangan	- 39 -
3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	- 40 -
PENUTUP	- 43 -
1. Kesimpulan	- 43 -
2. Saran	- 44 -

Lampiran	- 45 -
1. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan	- 45 -
2. Data Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan	- 48 -
3. Matriks Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan	- 49 -
4. Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan TA 2019	- 72 -
5. <i>Checklist</i> Muatan Substansi Laporan Kinerja.....	- 78 -
a. Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja Sesuai Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018.....	- 78 -
b. Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja Sesuai Memorandum Deputi Bidang Administrasi Nomor: M.513/Adm/11/2019 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet, Eselon I Dan Eselon II Tahun 2019	- 80 -
6. Dokumentasi Beberapa Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan	- 81 -

Daftar Tabel

Tabel 1 : Pejabat dan Staf di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan Yang Mendapatkan Promosi dan Mutasi.....	- 10 -
Tabel 2 : Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2019.....	- 16 -
Tabel 3 : Anggaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan.....	- 17 -
Tabel 4 : Anggaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan Setelah Revisi.....	- 18 -
Tabel 5 : Matriks Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2019 ..	- 22 -
Tabel 6 : Usulan Rekomendasi Kebijakan Atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perhubungan	- 26 -
Tabel 7 : Usulan Rekomendasi Kebijakan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perhubungan-	34 -
Tabel 8 : Usulan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, dan/atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan	- 37 -
Tabel 9 : Matriks Capaian Keluaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan	- 40 -

Daftar Gambar

Gambar 1 : Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan	- 3 -
Gambar 2 : Dashboard Sistem Informasi Kinerja Terpadu Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2019	- 5 -
Gambar 3 : Profil Sumber Daya Manusia di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan	- 7 -
Gambar 4 : Struktur Organisasi, Pejabat, dan Staf di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan	- 8 -
Gambar 5 : Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Perhubungan	- 12 -
Gambar 6 : Rumus penghitungan capaian IKU.....	- 17 -
Gambar 7 : Perbandingan Data Capaian, Output, dan Outcome Tahun 2015-2019.....	- 21 -
Gambar 8 : Perbandingan Jumlah Capaian Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2019 (Menurut Bulan)	- 24 -
Gambar 9 : Capaian Jumlah Outcome IKU per Bidang Tahun 2019	- 25 -
Gambar 10 : Kinerja Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan	- 39 -
Gambar 11 : Formula Penghitungan Evaluasi Output Kegiatan	- 41 -
Gambar 12 : Formula Penghitungan Penyerapan Anggaran	- 41 -
Gambar 13 : Formula Penghitungan Evaluasi Kinerja Anggaran.....	- 42 -
Gambar 14 : Suasana Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Mitigasi di Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta.....	- 81 -
Gambar 15 : Asisten Deputi Bidang Perhubungan Melakukan Kunjungan ke Project Site Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta	- 81 -
Gambar 16 : Rapat Koordinasi dengan PT. KAI (Persero) terkait Perkembangan dan Perencanaan Bisnis Terhadap Proyek-Proyek Perkeretaapian yang Sedang Ditangani serta Persiapan Menghadapi Idul Fitri 2019H.....	- 82 -
Gambar 17 : Tim Panitia Antar Kementerian RPerpres tentang Pengesahan The Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi Tentang Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007).....	- 82 -



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2019



Tujuan Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Perhubungan

Sasaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perhubungan

Kendala dan Upaya yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Kendala

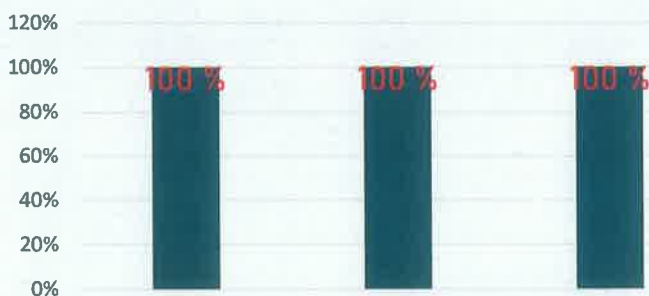
1. Jumlah SDM yang terbatas dan masih terdapat posisi struktural maupun fungsional yang masih kosong;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
3. Pengembangan kapasitas pegawai yang belum memenuhi kebutuhan organisasi.

Upaya

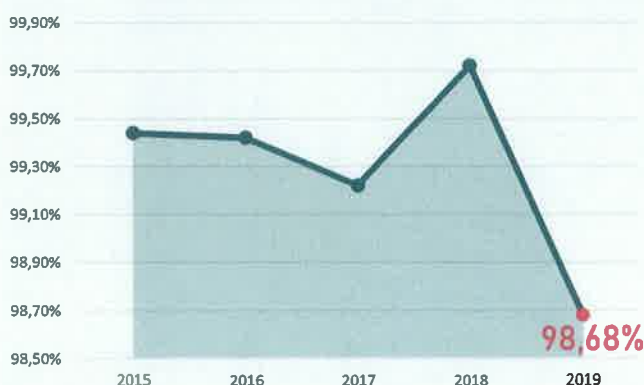
1. Perbantuan SDM lintas bidang;
2. Pengajuan peremajaan sarana dan prasarana yang memang harus segera diperbaharui;
3. Pengajuan Diklat dan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

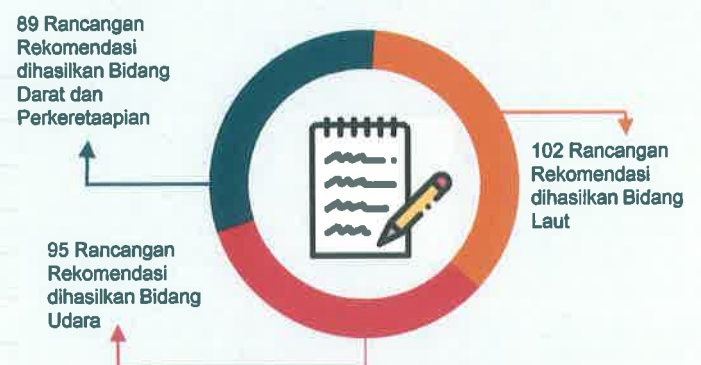
Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan yang Disetujui Oleh Deputi Bidang Perhubungan



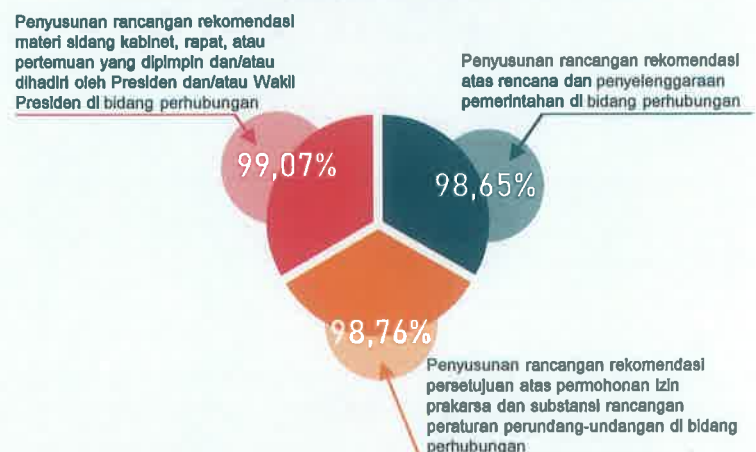
Persentase Realisasi Anggaran



Rancangan Rekomendasi Kebijakan per Bidang



Realisasi Anggaran Berdasarkan Komponen



PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Pelaksanaan SAKIP dilakukan secara berjenjang dari tingkatan satuan kerja, unit organisasi, hingga kementerian/lembaga.

Asisten Deputi Bidang Perhubungan sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Kabinet, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dimaksud menyusun laporan kinerja setiap tahunnya.

1. Penjelasan Umum

Laporan kinerja¹ merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Laporan kinerja tahunan yang disiapkan oleh masing-masing satuan kerja akan menjadi dasar bagi penyusunan laporan kinerja tahunan bagi unit organisasi. Laporan kinerja tahunan berisi ringkasan dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen APBN. Dalam penyusunannya, laporan kinerja tahunan menyajikan informasi:

- a. Uraian singkat organisasi;
- b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
- c. Pengukuran kinerja;
- d. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Kerja Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja tahunan Asisten Deputi Bidang Perhubungan berisikan capaian kinerja (*output*, *outcome*, dan penggunaan anggaran) Asisten Deputi Bidang Perhubungan tahun 2019 dan juga perbandingan capaian selama kurun waktu 2015

¹ Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sampai dengan dengan 2019, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai perkembangan kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan pada satu tahun masa pemerintahan.

2. Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan merupakan unit kerja Eselon II dibawah Deputi Bidang Kemaritiman, yang memiliki tanggungjawab untuk membantu Deputi Bidang Kemaritiman memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan.

Aspek Strategis

Visi Deputy Bidang Kemaritiman

Menjadi Asisten Deputy Bidang Kemaritiman yang Profesional dan Andal dalam Mendukung Sekretaris Kabinet Menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Kemaritiman

Visi Asisten Deputy Bidang Perhubungan

Menjadi Asisten Deputy Bidang Perhubungan yang Profesional dan Andal dalam Membantu Deputy Bidang Kemaritiman Mendukung Menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Perhubungan

Misi Asisten Deputy Bidang Perhubungan

Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan Sekretaris Kabinet di bawah koordinasi Deputy Bidang Kemaritiman pada Bidang Perhubungan dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan Asisten Deputy Bidang Perhubungan

Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Perhubungan

Sasaran Strategis Asisten Deputy Bidang Perhubungan

Tenwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perhubungan

Tugas dan Fungsi Asisten Deputy Bidang Perhubungan

		Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
		Penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah
		Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
		Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan
		Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
		Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum

Asisten Deputy Bidang Perhubungan
Sekretariat Kabinet



Gambar 1 : Aspek Strategis Asisten Deputy Bidang Perhubungan

Visi Asisten Deputi Bidang Perhubungan ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, serta dinamika lembaga kepresidenan yang strategis. Disamping itu juga mempertimbangkan masukan dari hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat Kabinet periode sebelumnya dan *area of improvement* dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Perumusan visi tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan kepada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Asisten Deputi Bidang Perhubungan diarahkan untuk menjadi unit kerja yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan untuk membantu Deputi Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet. Juga diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Visi tersebut diwujudkan dalam misi Asisten Deputi Bidang Perhubungan yaitu berupa analisis dan pemberian rekomendasi yang bersifat *second opinion* yang dapat dijadikan sebagai masukan kepada Presiden dan/atau instansi pemerintah lainnya. Hasil analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh instansi lain.

Pencapaian tujuan terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perhubungan, dipantau melalui pengukuran indikator kinerja. Tujuan merupakan hasil atau *outcome* yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Oleh karena jangka waktu capaiannya yang lebih panjang dari 1 tahun, maka tujuan tersebut perlu dijabarkan dalam capaian yang jangka waktunya lebih pendek lagi (capaian per tahun). Dengan demikian, penetapan tujuan perlu dirinci ke dalam sasaran-sasaran yang jangka waktunya maksimal adalah 1 tahun.

Pelaksanaan monitoring terhadap sasaran strategis dilakukan berbasis teknologi informasi, melalui aplikasi SIKT (Sistem Informasi Kinerja Terpadu). Pelaporan *output* dan *outcome* untuk tingkat Eselon II hingga Eselon IV dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan pelaporan capaian kinerja khusus untuk Eselon II dilakukan setiap bulannya dan dilaporkan kepada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Disajikan pada Gambar 2, terlihat bahwa pada tahun 2019 besaran capaian *output* dan *outcome* Asisten Deputi Bidang Perhubungan berada pada angka 100%. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan pada Bab “Akuntabilitas Kinerja”.

3. Struktur Organisasi

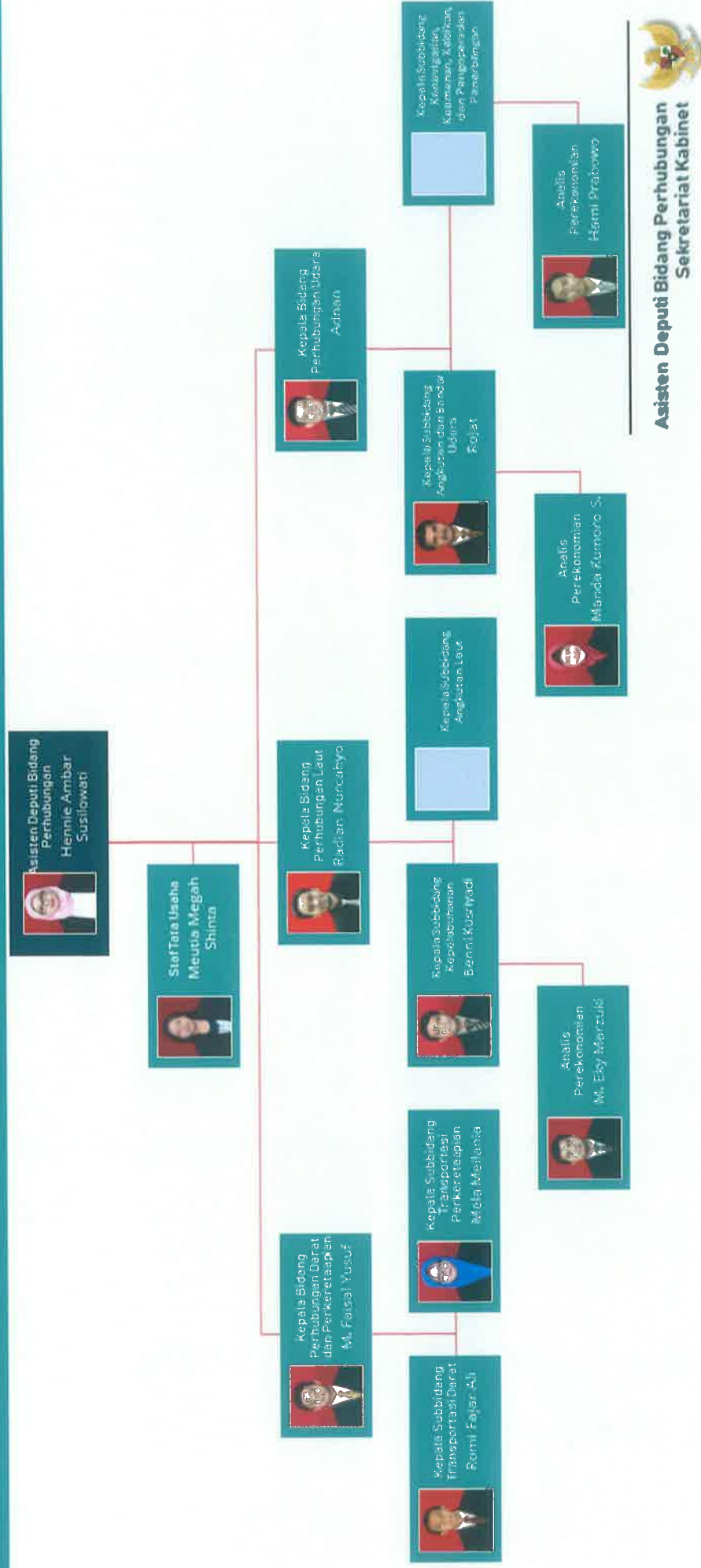
Analisa Sumber Daya Manusia



Asisten Deputi Bidang Perhubungan
Sekretariat Kabinet

Gambar 3 : Profil Sumber Daya Manusia di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan



Gambar 4 : Struktur Organisasi, Pejabat, dan Staf di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam sebuah organisasi. Bagi sebuah organisasi yang menjadi bagian dari lembaga kepresidenan, dibutuhkan sumber daya manusia yang cakap dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan kerja yang dinamis. Secara akademis sumber daya manusia di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan merupakan lulusan pendidikan tinggi Strata 1 dan mayoritas bidang ilmu hukum (Gambar 3). Sebagai sebuah institusi kepresidenan, kebutuhan akan sumber daya manusia berlatar belakang ilmu hukum merupakan hal yang dibutuhkan, akan tetapi tetap diperlukan diversifikasi bidang ilmu sehingga rekomendasi yang dihasilkan makin komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek keilmuan.

Dengan mempertimbangkan usia pejabat dan staf di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang mayoritas berkisar antara 26 – 31 tahun, masih memungkinkan untuk mengikuti pendidikan baik formal maupun informal untuk meningkatkan kapasitas dan diversifikasi bidang ilmu, dengan tetap memperhatikan dinamika kebutuhan pekerjaan. Diharapkan ke depan, para pejabat dan staf di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan tidak hanya mampu dalam bidang hukum saja, akan tetapi juga mampu dalam bidang ekonomi, sosial, dan bidang lainnya, mengingat dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden juga perlu mempertimbangkan aspek lainnya sehingga tercipta sebuah rekomendasi kebijakan yang komprehensif.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet, dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bidang untuk masing-masing sektor perhubungan, yaitu **bidang perhubungan darat dan perkeretaapian**, **bidang perhubungan laut**, dan **bidang perhubungan udara**. Para Kepala Bidang juga didukung oleh Kepala Subbidang pada sektor khusus dan analisis substansi (dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Perhubungan hanya memiliki Analisis Perekonomian saja). Guna pelaksanaan fungsi administrasi, Asisten Deputi Bidang Perhubungan dibantu oleh seorang staf tata usaha (Gambar 4).

Secara struktural, pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan masih terdapat dua posisi struktural Kepala Subbidang yang masih belum terisi serta Kepala Subbidang yang belum memiliki staf analisis (jabatan fungsional). Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari timbul diskresi untuk skema kerjasama

antarbidang atau antarsubbidang. Hal tersebut efektif untuk pelaksanaan pekerjaan dengan *load* yang rendah, akan tetapi ketika *load* pekerjaan sedang tinggi menimbulkan beban kerja yang tinggi pada masing-masing individu.

Pada tahun 2019, beberapa pejabat dan staf di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan mendapatkan promosi jabatan baik di dalam Asisten Deputi Bidang Perhubungan, lintas kedeputian, dan lintas kementerian/lembaga. Juga terdapat pejabat dan staf yang mendapatkan mutasi jabatan dan penempatan. Adapun pejabat dan staf yang mendapatkan promosi maupun mutasi tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1 : Pejabat dan Staf di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan Yang Mendapatkan Promosi dan Mutasi

No.	Nama	NIP/Golongan	Jabatan Lama	Jabatan Baru	TMT Jabatan
1	Hennie Ambar Susilowati	19730516 199903 2 001 IV/b Pembina Tk. I	Kepala Bidang Wilayah Perbatasan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Asisten Deputi Bidang Perhubungan, Deputi Bidang Kemaritiman	7 Februari 2019
2	Chairul Saleh	19760831 200212 1 001 IV/b Pembina Tk. I	Kepala Bidang Perhubungan Laut, Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet	Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	23 Mei 2019
3	Radian Nurcahyo	19731212 200212 1 001 IV/b Pembina Tk. I	Kabid Kawasan Ekonomi dan Sistem Logistik, Deputi Bidang Perekonomian	Kepala Bidang Perhubungan Laut, Deputi Bidang Kemaritiman	20 Agustus 2019
4	Benni Kusriyadi	19830701 200501 1 001 III/c Penata	Kepala Subbidang Kenavigasian, Lalu Lintas, dan	Kepala Subbidang Kepelabuhanan, Deputi Bidang Kemaritiman	20 Agustus 2019

No.	Nama	NIP/Golongan	Jabatan Lama	Jabatan Baru	TMT Jabatan
			Angkutan Laut, Deputi Bidang Kemaritiman		
5	Rojat	19680611 199503 1 001 III/c Penata	Kepala Subbidang Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan, Deputi Bidang Kemaritiman	Kepala Subbidang Angkutan dan Bandar Udara, Deputi Bidang Kemaritiman	20 Agustus 2019
6	Nabila Azwida Faradisa	19930710 201801 2 001 III/a Penata Muda	Analisis Hukum pada Subbidang Transportasi Darat, Deputi Bidang Kemaritiman,	Analisis Hukum pada Subbidang Pternakan dan Perkebunan, Deputi Bidang Perekonomian	20 Agustus 2019

4. Analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT)

Sebagai sebuah unit kerja, Asisten Deputi Bidang Perhubungan juga mengalami kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kendala tersebut dapat bersumber dari internal maupun eksternal organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan. Asisten Deputi Bidang Perhubungan dituntut untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika isu-isu strategis yang ada, sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang dapat menggambarkan sisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan sisi eksternal (peluang dan tantangan).

Analisis *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, and *Threats* (SWOT)



STRENGTHS

1. Adanya tugas dan fungsi yang spesifik dan berbeda dengan Kementerian/Lembaga lainnya;
2. Tersedianya sistem informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.



WEAKNESS

1. Jumlah SDM yang terbatas dan masih terdapat posisi struktural maupun fungsional yang masih kosong;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
3. Pengembangan kapasitas pegawai yang belum memenuhi kebutuhan organisasi.



OPPORTUNITY

1. Sistem informasi yang masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
2. Posisi strategis Lembaga yang dapat melakukan *bottlenecking* lebih cepat dan efektif.



THREATS

Terdapat Kementerian/Lembaga lain yang juga memiliki tugas dan fungsi yang serupa dengan sumber daya dan dukungan yang lebih memadai.



Asisten Deputi Bidang Perhubungan
Sekretariat Kabinet

Gambar 5 : Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Sebagai usaha peningkatan kinerja melalui pengembangan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, Asisten Deputi Bidang Perhubungan menggunakan metode analisis SWOT guna mempermudah penentuan arah pengembangan organisasi kedepannya. Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan adalah memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dan posisi yang strategis sebagai bagian dari lembaga kepresidenan. Selain itu dalam hal informasi, Sekretariat Kabinet memiliki peran yang strategis yaitu terkait dengan informasi kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, atau pertemuan lainnya sebagai Arahan Presiden. Dalam hal ini, peran Sekretariat Kabinet adalah melakukan monitoring, evaluasi, dan *debottlenecking*. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dilakukan pengembangan aplikasi diantaranya:

a. SITAP (Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden)

Sebuah aplikasi berbasis intranet yang dimanfaatkan oleh Sekretariat Kabinet untuk digitalisasi Arahan dan Janji Presiden saat sidang kabinet, rapat terbatas, atau pertemuan lainnya. SITAP juga digunakan untuk melakukan monitoring tindaklanjut arahan dan janji tersebut yang diisi oleh kementerian koordinator.

b. SIPT (Sistem Informasi Persuratan Terpadu)

Aplikasi persuratan berbasis internet yang *real time*, pengembangan aplikasi ini memudahkan pengajuan berkas secara berjenjang sehingga dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, sekaligus juga mendorong pelaksanaan *e-government* di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan masih terdapat “ancaman” mengingat pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Perhubungan khususnya dan Sekretariat Kabinet secara umum masih *overlapping* dengan beberapa kementerian/lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan koordinasi lintas kementerian/lembaga sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan efektif dan efisien.

Asisten Deputi Bidang Perhubungan juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah masih terdapat posisi jabatan struktural dan fungsional yang masih kosong. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 4, dimana terdapat dua posisi Eselon IV yang masih belum terisi dan jabatan fungsional analis yang hanya tiga orang saja yang berdampak pada beban kerja yang tinggi bagi masing-masing orang. Akan tetapi, kelemahan tersebut dapat dijawab melalui skema kerjasama lintas bidang dan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Sebagai unit kerja Eselon II di bawah pimpinan Deputi Bidang Kemaritiman, Asisten Deputi Bidang Perhubungan juga memiliki kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) guna mendukung tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional² antara lain mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Lebih lanjut Renstra Asisten Deputi Bidang Perhubungan tahun 2015-2019 disusun berpedoman dan diarahkan untuk mendukung perwujudan visi Presiden, 7 (tujuh) misi pembangunan, dan agenda prioritas Kabinet Kerja yang kemudian dikenal dengan “Nawacita”.

Renstra Asisten Deputi Bidang Perhubungan berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan serta lebih menitikberatkan pada hasil daripada kegiatan administrasi dan output. Visi Asisten Deputi Bidang Perhubungan, “Menjadi Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang profesional dan andal dalam membantu Deputi Bidang Kemaritiman mendukung menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Perhubungan.” Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Asisten Deputi Bidang Perhubungan diarahkan untuk menjadi unit kerja yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan untuk membantu Deputi Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet berupa pemberian dukungan kebijakan dan administrasi secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel di Bidang Perhubungan.

Guna pencapaian visi tersebut, ditetapkan misi Asisten Deputi Bidang Perhubungan:

“Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan Sekretaris Kabinet, di bawah koordinasi Deputi Bidang Kemaritiman pada Bidang Perhubungan dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.”

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan perumusan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan. Asisten Deputi Bidang Perhubungan menetapkan tujuan sebagai berikut, “Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan Pemerintah di Bidang Perhubungan.”

Sasaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan tahun 2015-2019 menggambarkan hal yang ingin dicapai pada jangka waktu lima tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Asisten Deputi Bidang Perhubungan menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019 adalah, “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di Bidang Perhubungan.”

2. Uraian Perjanjian Kinerja (PK)

Penetapan perjanjian kinerja ditujukan kepada setiap unit organisasi agar dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian-capaian kinerja dari setiap unit organisasi dengan target tertentu. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka sesuai dengan PK Asisten Deputi Bidang Perhubungan, target capaian kinerja tahun 2019 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2019

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 %
2		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 %
3		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi Sidang Kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 %

Penghitungan capaian Indikator Utama yang selanjutnya disebut *outcome* didasarkan pada manual indikator kinerja Kedeputan Bidang Kemaritiman, yaitu "Menyetujui/menyampaikan lebih lanjut kepada pihak lain/merespon/memanfaatkan", hal tersebut dimaknai bahwa Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan dengan memberikan disposisi lebih lanjut atau dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet. Penghitungan capaian untuk masing-masing IKU menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rekomendasi kebijakan dari Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang disetujui Deputi Bidang Kemaritiman}}{\text{Rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan}} \times 100 \%$$

Gambar 6 : Rumus penghitungan capaian IKU

Guna pelaksanaan target kinerja tersebut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan untuk tahun 2019 mendapatkan dukungan anggaran total Rp 1.050.000.000,00. Adapun besaran anggaran setiap kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Anggaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan	Rp 833.923.000,00
2	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan	Rp 62.093.000,00
3	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan	Rp 153.984.000,00

Selama pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2019, Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah beberapa kali mengajukan revisi anggaran. Revisi tersebut

dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pekerjaan yang ada. Adapun besaran anggaran setiap kegiatan setelah dilakukan revisi adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : Anggaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan Setelah Revisi

No.	Kegiatan	Anggaran Awal (satuan Rp)	Anggaran Revisi (satuan Rp)	Besaran Perubahan
1	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan	833.923.000,00	928.070.000,00	17,76 %
2	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan	62.093.000,00	52.550.000,00	-15,36 %
3	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang	153.984.000,00	69.380.000,00	-58,83%

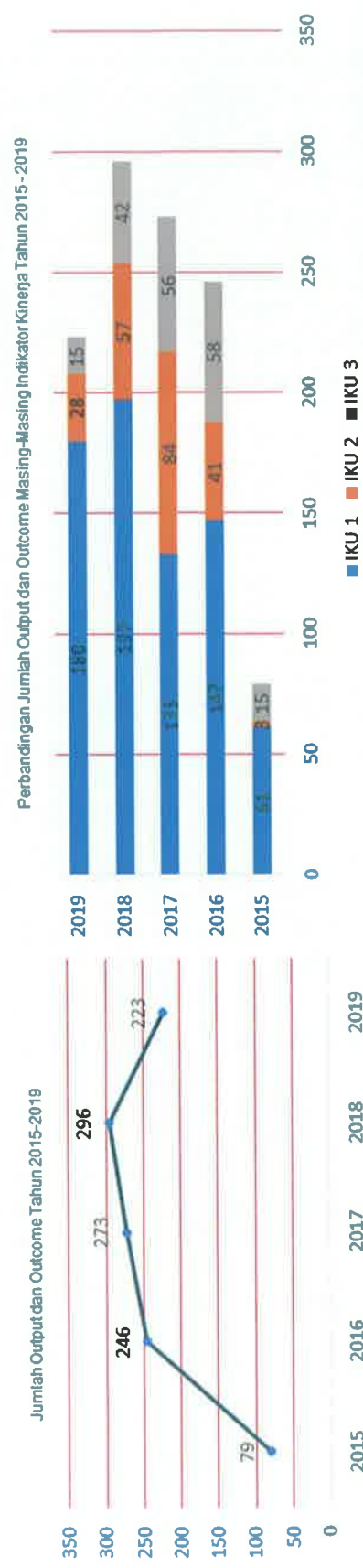
No.	Kegiatan	Anggaran Awal (satuan Rp)	Anggaran Revisi (satuan Rp)	Besaran Perubahan
	perhubungan			

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan juga dalam rangka mewujudkan visi misi Asisten Deputi Bidang Perhubungan. Pada bab ini akan disajikan capaian kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2019 dibandingkan dengan periode 2015-2018, sehingga dapat terlihat perkembangan yang terjadi.

1. Capaian Kinerja

Perbandingan Data Capaian, Output, dan Outcome



Asisten Deputi Bidang Perhubungan
Sekretariat Kabinet

Gambar 7 : Perbandingan Data Capaian, Output, dan Outcome Tahun 2015-2019

Tabel 5 : Matriks Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2019

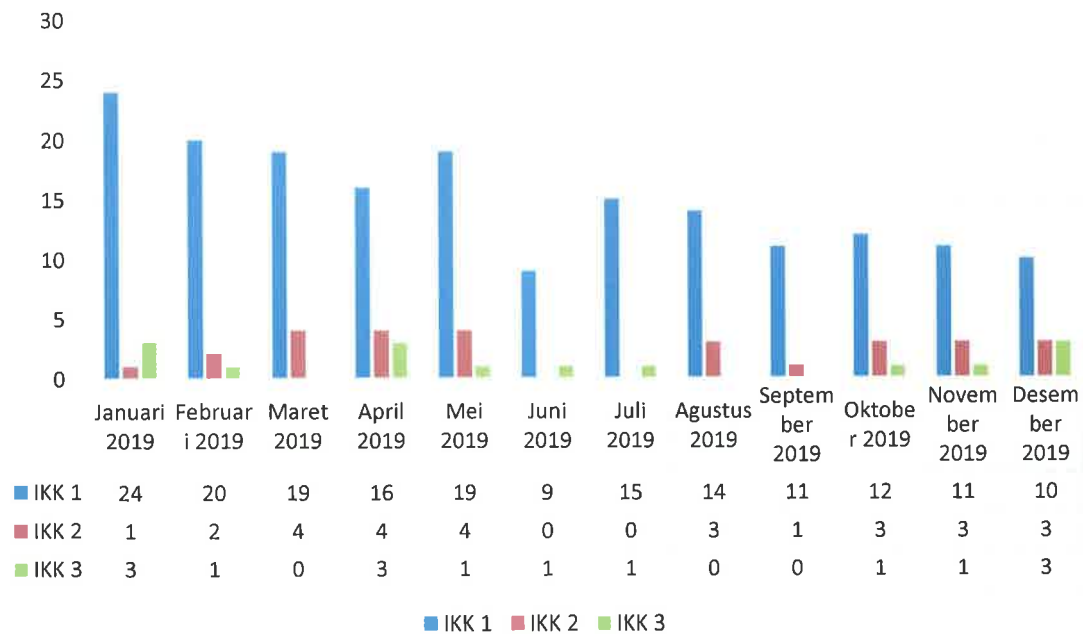
Program	: Dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan						
Kegiatan	: Dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perhubungan						
Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perhubungan						
Indikator Kinerja	Kinerja			Alokasi Anggaran			Persentase Realisasi
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi		
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perhubungan	100 %	100 %	100 %				
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 %	100 %	100 %	Rp 1.050.000.000	Rp 1.036.206.765		98,68%
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 %	100 %	100 %				

Terlihat pada Gambar 7, pada tahun 2019 capaian Asisten Deputy Bidang Perhubungan pada masing-masing indikator mencapai nilai 100%. Hal tersebut menandakan bahwa pada tahun 2019, seluruh rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputy Bidang Perhubungan kepada Deputy Bidang Kemaritiman telah disetujui atau mendapatkan arahan lebih lanjut. Jika dibandingkan dengan target PK (Tabel 2), maka capaian Asisten Deputy Bidang Perhubungan telah sesuai dengan target dalam PK, yaitu 100% untuk masing-masing indikator.

Pada tahun 2019, Asisten Deputy Bidang Perhubungan telah menyampaikan 223 berkas rekomendasi kebijakan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 180 berkas rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. 28 berkas rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan; dan
- c. 15 berkas rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan.

80,7% merupakan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut sebagian besar terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur konektivitas yang menjadi amanat dalam RPJMN 2015-2019. Asisten Deputy Bidang Perhubungan secara aktif terus menerus melakukan monitoring, evaluasi, dan *debottlenecking* bagi pembangunan proyek-proyek infrastruktur konektivitas dalam RPJMN 2015-2019 dan terutama yang termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.



Gambar 8 : Perbandingan Jumlah Capaian Asisten Deputy Bidang Perhubungan Tahun 2019 (Menurut Bulan)

Jika dilakukan perbandingan untuk masing-masing indikator per bulan pada tahun 2019 (Gambar 8), terlihat pada bulan Januari 2019 jumlah capaian untuk rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan mencapai jumlah tertinggi yaitu sebanyak 24 rekomendasi. Dalam bulan Januari tersebut banyak rekomendasi guna evaluasi dan persiapan pengoperasian infrastruktur konektivitas yang sudah selesai dibangun dan siap dioperasikan. Selain itu, juga mempersiapkan evaluasi beberapa proyek infrastruktur yang harus dilakukan *debottlenecking*.

Perbandingan capaian juga dilakukan berdasarkan tahun (Gambar 7), secara umum jumlah capaian Asisten Deputy Bidang Perhubungan pada tahun 2018 merupakan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 296 rekomendasi. Sejak tahun 2015 hingga 2019, secara umum jumlah rekomendasi dari Asisten Deputy Bidang Perhubungan yang disetujui menunjukkan tren meningkat dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan siklus, dimana pada tahun 2018 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2015-2019, mulai memasuki tahap evaluasi akhir. Dimana melalui evaluasi akhir tersebut, Asisten Deputy Bidang Perhubungan aktif melakukan evaluasi terhadap seluruh proyek dan kebijakan pemerintah di bidang perhubungan, sedangkan pada tahun 2019 hanya dilakukan *debottlenecking* pada proyek-proyek atau kebijakan yang perlu dilakukan penyelesaian lebih lanjut saja.



Gambar 9 : Capaian Jumlah Outcome IKU per Bidang Tahun 2019

Secara struktural, Asisten Deputi Bidang Perhubungan memiliki 3 unit Eselon III yang mewakili masing-masing moda transportasi. Dalam Gambar 9, terlihat bahwa secara umum Bidang Perhubungan Laut memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian Asisten Deputi Bidang Perhubungan. Terlihat bahwa Bidang Perhubungan Laut mengajukan 74 rancangan rekomendasi pada IKU 1, 18 rancangan rekomendasi pada IKU 2, dan 10 rancangan rekomendasi pada IKU 3.

a. Contoh Rancangan Rekomendasi Kebijakan Atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perhubungan

Tabel 6 : Usulan Rekomendasi Kebijakan Atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perhubungan

No.	Isu	Usulan Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan
1	Pengelolaan transportasi Jabodetabek	Dalam rangka menyelesaikan permasalahan terhadap pengelolaan transportasi di Jabodetabek, pada tanggal 8 Januari 2019 diselenggarakan Rapat Terbatas mengenai Pengelolaan Transportasi Jabodetabek. Dalam Rapat Terbatas tersebut, Presiden memberikan arahan antara lain agar segera dilakukan penyederhanaan manajemen pengelolaan transportasi dengan melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Menindaklanjuti Rapat Terbatas tersebut, Gubernur DKI Jakarta melalui surat nomor: 156/-1.811 tanggal 28 Februari 2019, menyampaikan tindaklanjut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap hasil Rapat Terbatas tanggal 8 Januari 2019 (Dilaporkan kepada Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum nomor: M.0089/Maritim-3/03/2019 hal laporan perkembangan tindak lanjut Rapat Terbatas tentang pengelolaan transportasi Jabodetabek). Guna melakukan pembahasan lebih lanjut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 13 Maret 2019, kesepakatan rapat tanggal 13 Maret 2019, antara lain : a. Kementerian BUMN agar segera melakukan kajian rencana pembelian saham mayoritas PT. KCI oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; b. Kementerian Perhubungan akan segera menyelesaikan kajian skema pendanaan

No.	Isu	Usulan Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan
		pembangunan MRT Koridor Timur-Barat. Kembali diselenggarakan Rapat Terbatas pada tanggal 19 Maret 2019 tentang Lanjutan Pembahasan Kebijakan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet untuk melakukan kajian terhadap PUU yang dapat mendukung percepatan pengelolaan transportasi di Jabodetabek. Sehubungan Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 19 Maret 2019 tersebut, guna mendorong percepatan penyelesaian pengelolaan transportasi Jabodetabek, Arahan Presiden disampaikan kepada Menteri Perhubungan dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk tindak lanjutnya serta Kementerian Hukum dan HAM (tembusan) agar terinformasi apabila nanti perlu ada aturan hukum. (Dilaporkan kepada Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum nomor: M.0169/Maritim-3/04/2019 hal tindak lanjut integrasi transportasi Jabodetabek).
2	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan	Program Tol Laut yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun, belum didukung dengan pengadaan dan alokasi anggaran kontrak tahun jamak/<i>multiyears contract</i>. Kontinuitas anggaran tahun jamak (<i>multiyears</i>) dinilai menjamin operasional layanan publik angkutan laut, yang dapat dilaksanakan mulai awal tahun secara berkelanjutan. Program Tol Laut perlu didukung pengawasan dan pengendalian terhadap petugas kapal dan pengusaha yang menggunakan jasa kapal tol laut dalam hal pengiriman dan penerimaan barang.

No.	Isu	Usulan Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan
		Keterbatasan jenis bahan pokok dan penting (berdasarkan Perpres 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting) dinilai menyebabkan terbatasnya jumlah muatan kapal. Kementerian Perdagangan akan menetapkan lebih lanjut jenis barang dengan memperhatikan masukan dari Menteri Perhubungan dan Pemda, dalam rangka evaluasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpapar, Terpencil, dan Perbatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 (Perpres Program Tol Laut), Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada tanggal 2 Mei 2019. Rapat menyepakati: Efektivitas program Tol Laut perlu didukung optimalisasi konektivitas multimoda lain yaitu Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Angkutan Jalan, dan Angkutan Udara sehingga perlu dukungan pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di darat melalui penugasan Perum Damri, sebagaimana telah diamatkan dalam Perpres No. 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpapar, Terpencil, dan Perbatasan (hasil rapat telah disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum nomor: M.0223/Maritim-3/05/2019 hal laporan koordinasi evaluasi

No.	Isu	Usulan Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan
		pelaksanaan program Tol Laut dan surat Deputi Bidang Kemaritiman nomor: B.0412/Maritim/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 hal penyampaian hasil evaluasi pelaksanaan program Tol Laut). Surat tersebut telah ditindaklanjuti dengan beberapa kali rapat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman guna pembahasan perubahan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017.
3	Peningkatan Keselamatan Transportasi	Kenyamanan dan keamanan transportasi umum patut ditunjang dengan keselamatan dan keamanan transportasi yang tinggi. Keselamatan dan keamanan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Saat ini tingkat rata-rata korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 3-4 orang meninggal setiap jamnya. Dalam Rapat Terbatas tentang Perlindungan Konsumen (21 Maret 2017) Presiden memberi arahan kepada Menteri Perhubungan agar memastikan kegiatan pengecekan untuk sektor transportasi darat, laut, dan udara dilakukan secara rutin dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu, dalam Rapat Terbatas tentang Persiapan Natal dan Tahun Baru (18 Desember 2017) dan Rapat Terbatas tentang Persiapan Menghadapi Idul Fitri 1440 H / 2019 H (3 Mei 2019) Presiden kembali memberi arahan bahwa Pemerintah harus memastikan layanan transportasi mudah di akses oleh Masyarakat, aman, dan nyaman. Utamakan keselamatan warga dalam menggunakan sarana transportasi baik darat, laut,

No.	Isu	Usulan Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan
		maupun udara. Menindaklanjuti hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan menyelenggarakan serangkaian pemantauan dan rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet, diperoleh beberapa rekomendasi yang sampai saat ini masih dilakukan kajian oleh Sekretariat Kabinet. Kegiatan rapat koordinasi tersebut telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum nomor: M.0561a/Maritim-3/12/2019 hal laporan kegiatan mengenai Peningkatan Keselamatan Transportasi dengan mengoptimalkan implementasi regulasi dari budaya keselamatan transportasi.
4	Kenaikan tarif angkutan penumpang udara kelas ekonomi	Memorandum Deputi Bidang Perekonomian kepada Deputi Bidang Kemaritiman nomor: M.0275/Ekon/4/2019 tanggal 9 April 2019 hal pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan regulasi mengenai penerapan tarif batas atas tiket pesawat, menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, bahwa kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan menyumbang 0,10 % terhadap inflasi bulan Maret 2019. Tarif angkutan udara menjadi komoditas penyumbang inflasi dengan kontribusi sebesar 0,03 %. Menindaklanjuti memorandum tersebut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait pada 26 April 2019. Dalam rapat koordinasi tersebut diperoleh informasi:

No.	Isu	Usulan Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan
		a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 25-26 Maret 2019 yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan, perwakilan maskapai, perwakilan Online Travel Agent (OTA), dan INACA, dalam rapat tersebut disampaikan meminta maskapai untuk melakukan penyesuaian tarif penerbangan dengan melakukan diskon, namun dengan tetap memperhatikan cost and benefit dari usahanya; b. Dalam rapat diperoleh kesepakatan mengingat permasalahan tarif angkutan penumpang udara merupakan isu yang strategis dan berdampak nasional maka penanganannya diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum nomor: M.0209/Maritim-3/05/2019 hal laporan rakor tarif angkutan udara yang ditindaklanjuti dengan memorandum Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet nomor: M.0171/ Maritim/05/2019 hal laporan rapat koordinasi tarif angkutan penumpang udara). Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengkoordinasikan dan menghasilkan beberapa kesepakatan yang intinya Pemerintah bersama-sama maskapai penerbangan dan operator penerbangan akan menyediakan penerbangan murah bagi masyarakat.
5	Operasionalisasi Bandar Udara	Guna meningkatkan pelayanan transportasi dan konektivitas khususnya di Provinsi DI

No.	Isu	Usulan Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan
	Internasional Yogyakarta	Yogyakarta perlu dilakukan percepatan pembangunan PSN bandar udara baru di Kulon Progo. Pembangunan bandar udara baru di Yogyakarta, tidak dapat ditunda mengingat kapasitas bandar udara eksisting yang sudah melebihi kapasitas dan tidak mungkin untuk dilakukan pengembangan. Rencana pengoperasian bandar udara sempat terkendala beberapa kendala, namun telah dibahas dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 19 Februari 2019 dengan kesimpulan perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait area latihan tempur antara TNI, Kementerian Perhubungan, AirNav, dan PT. Angkasa Pura I (Persero) (telah disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum nomor: M.0098/Maritim-3/02/2019 hal laporan hasil rapat koordinasi ruang udara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA)). Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2017 bahwa bandara baru di Kulon Progo beroperasi minimal pada April 2019. Menteri Perhubungan kepada Presiden melalui surat: UM.201/3/13 Phb 2019 tanggal 24 April 2019 menyampaikan permohonan kegiatan peresmian Bandara Kulon Progo. Menindaklanjuti surat tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman memandang bahwa pelaksanaan <i>soft launching</i> YIA ditunda pelaksanaannya, mengingat pengoperasian bandar udara perlu memperhatikan berbagai aspek baik dari sisi darat maupun sisi udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, sarana dan prasarana penunjang serta aksesibilitas moda

No.	Isu	Usulan Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan
		transportasi dari dan ke bandara (telah disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum nomor: M.0198/Maritim/04/2019 hal usulan kegiatan peresmian Bandar Udara Internasional Yogyakarta). Terkait rencana pengoperasionalan secara penuh, perlu dilakukan percepatan kegiatan mitigasi bencana di kawasan sekitar bandara, mengingat bandara tersebut berada di lokasi rawan bencana alam gempa bumi dan tsunami. Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Perekonomian bersama-sama dengan Deputi Bidang Kemaritiman telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 20 Juni 2019 guna menyepakati langkah-langkah percepatan pembangunan mitigasi bencana dimaksud. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi guna melakukan updating progres percepatan pembangunan mitigasi bencana pada tanggal 8 November 2019 (telah disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum nomor: M.0495/Maritim-3/11/2019 hal laporan rapat koordinasi percepatan kegiatan mitigasi bencana di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta). Terhadap hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Kemaritiman, telah disampaikan hasil kesepakatan rapat terbaru melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman nomor: B.1000/Maritim/11/2019 tanggal 26 November 2019 ditujukan

No.	Isu	Usulan Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan
		kepada para stakeholder terkait. Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Kemaritiman, telah dilakukan rapat koordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 4 Desember 2019 guna melakukan <i>updating</i> terhadap surat Deputi Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melalui surat nomor: B/IPW.2/204/D.VI.M.EKON/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 telah menyampaikan secara resmi <i>updating</i> timeline yang telah disepakati pada rapat koordinasi tanggal 8 November 2019.

- b. Contoh Rancangan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan

Tabel 7 : Usulan Rekomendasi Kebijakan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perhubungan

No.	Isu	Usulan Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan
1	Peraturan perundang-undangan terkait pelayaran rakyat	Untuk mempertahankan eksistensi pelayaran rakyat sebagai aset budaya bahari, diperlukan terobosan melalui pemberdayaan usaha Pelra di bidang wisata bahari dan/atau optimalisasi pemanfaatan rute tol laut yang tidak dapat dilalui kapal kontainer karena kedalaman alur pelayaran. Guna mendorong kebijakan perluasan usaha Pelra sebagai wisata bahari, dan kebijakan pemberdayaan Pelra yang terintegrasi dengan program Tol Laut, diusulkan pengaturan/payung hukum setingkat Peraturan Presiden mandiri. Penyusunan RPerpres merupakan suatu kebijakan afirmatif terhadap Kapal Pelayaran-Rakyat Untuk mempertahankan

No.	Isu	Usulan Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan
		warisan budaya dan mendorong kemajuan, kemakmuran, serta memberikan kesejahteraan yang adil dan merata, perlu adanya kebijakan pemerintah untuk pemberdayaan pelayaran rakyat. Menindaklanjuti hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah menyampaikan memorandum dan surat: - M.0201/Maritim-3/04/2019 hal Permohonan Izin Prakarsa Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat; - M.0239/Maritim-3/05/2019 hal Laporan Rapat Pembahasan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat (PELRA); - B-168/Seskab/Maritim/05/2019 hal Sekretariat Kabinet mendorong agar diterbitkan Izin Prakarsa Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat yang telah ditindaklanjuti dengan persetujuan prakarsa oleh Presiden. Deputi Bidang Kemaritiman telah ikut secara aktif serta dalam pembahasan RPerpres dimaksud.
2	Peraturan perundang-undangan terkait percepatan pembangunan Jawa Tengah	Presiden dalam pengantar Rapat Terbatas tanggal 9 Juli 2019 tentang Percepatan Pembangunan Jawa Tengah menyampaikan, Indonesia membutuhkan dorongan ekonomi yang besar dan Jawa Tengah dapat memberikan dorongan yang dibutuhkan. Menindaklanjuti Arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi menentukan program/kegiatan yang dapat mendorong perekonomian. Asisten Deputi Bidang Perhubungan melaporkan kepada Deputi Bidang Kemaritiman

No.	Isu	Usulan Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan
		bahwa pada rapat koordinasi awal jumlah program/kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota masih terlalu besar sehingga perlu dilakukan penajaman program/kegiatan (telah disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum nomor: M.0406/Maritim-3/09/2019 hal laporan rapat koordinasi kompilasi, validasi, dan pemutakhiran usulan program/kegiatan prioritas dalam rangka penyiapan master list percepatan pembangunan Jawa Tengah).Setelah dilakukan berbagai rapat koordinasi dan penajaman, telah dipilih dan diputuskan 270 program/kegiatan yang diharapkan dapat memberikan dorongan perekonomian dengan skema pembiayaan APBN, APBD, BUMN/BUMD/Swasta, dan KPBU. Melalui serangkaian pertemuan dan pembahasan, Asisten Deputi Bidang Perhubungan berperan aktif dalam penyusunan RPerpres sebagai payung hukum terhadap program/kegiatan di Jawa Tengah dimaksud. Selanjutnya telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang. Guna memastikan pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 sesuai dengan timeline, Asisten Deputi Bidang Perhubungan berperan aktif dalam penyiapan pelaksanaan Peraturan Presiden dimaksud bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (telah disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum nomor : M.0566/Maritim-3/12/2019 hal laporan sosialisasi percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Provinsi

No.	Isu	Usulan Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan Jawa Tengah (Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019).

- c. Contoh Rancangan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, dan/atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan

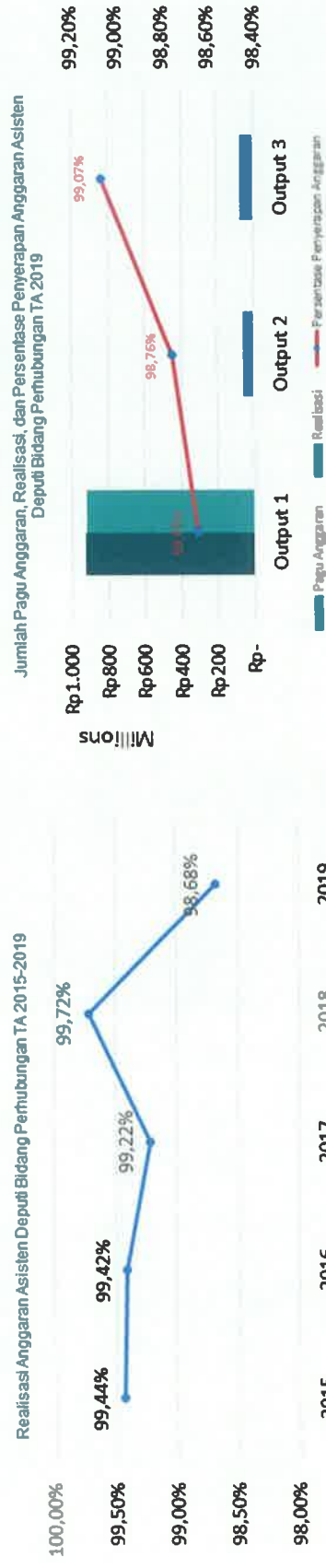
Tabel 8 : Usulan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, dan/atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan

No.	Isu	Usulan Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan
1	Rapat Terbatas menghadapi Idul Fitri 1440H/2019M	Guna membahas persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi hambatan, gangguan, dan permasalahan pada saat Hari Raya Idul Fitri 2019 pada tanggal 3 Mei 2019 telah diselenggarakan Rapat Terbatas tentang persiapan menghadapi Idul Fitri 1440H/2019M (telah disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman memorandum nomor: M.0211/Maritim-3/05/2019 hal briefing sheet dan infografis Rapat Terbatas persiapan menghadapi Idul Fitri 1440H/2019M). Menindaklanjuti Arahan Presiden pada Rapat Terbatas menghadapi Idul Fitri 1440H/2019M tanggal 3 Mei 2019, Asisten Deputi Bidang Perhubungan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan selaku Koordinator Pelaksana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Nasional Tahun 2019 (1440 H) dan operator transportasi melaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum nomor: M.0249/Maritim-3/05/2019 hal laporan tindak lanjut Rapat Terbatas tentang persiapan menghadapi Idul Fitri 1440H/2019M. Hasil koordinasi dengan rekomendasi: a. Guna memastikan angkutan lebaran dapat berjalan dan menekan angka kecelakaan serta

No.	Isu	Usulan Rekomendasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan
		mengurangi kepadatan lalu lintas, masih diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), sebagai berikut: 1) Penerbitan terhadap perlintasan sebidang yang tidak resmi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi seluruh rambu-rambu lalu lintas dan menjaga keberadaan rambu-rambu lalu lintas; 2) Peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan, dan laut guna memastikan keselamatan transportasi; 3) Pengendalian dan penerbitan pasar tumpah yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas; 4) Penyediaan transportasi lanjutan dari dan menuju simpul transportasi seperti terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara; 5) Antisipasi kejadian bencana dan cuaca ekstrem. b. permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan angkutan lebaran dan memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah perlu diteruskan kepada Kemendagri untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah (surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0201/Seskab/Maritim/05/2019 tanggal 24 Mei 2019).

2. Akuntabilitas Keuangan

Kinerja Penyerapan Anggaran



Gambar 10 : Kinerja Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Dalam rangka menunjang pencapaian indikator kinerja, Asisten Deputi Bidang Perhubungan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA Sekretariat Kabinet Tahun 2019. Dijelaskan pada Gambar 10, besaran pagu anggaran sebesar Rp 1.050.000.000, dengan besaran realisasi sebesar Rp 1.036.206.765 (98,68% dari pagu anggaran). Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2015 hingga 2018, realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan paling tinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 99,72% dan yang paling rendah adalah pada tahun 2019 sebesar 98,68%.

Secara detail, pada tahun 2019 penyerapan anggaran terbesar pada Output 3 yaitu sebesar 99,07% dimana pagu revisi pada Output 3 adalah sebesar Rp 69.380.000 dengan realisasi sebesar Rp 67.537.500. Pagu awal pada Output 3 adalah sebesar Rp 153.984.000. Perbandingan pagu awal dan pagu revisi tersebut disajikan pada Tabel 4. Output 3 mengalami revisi paling besar yaitu turun 58,83%, dikarenakan pada tahun 2019 penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Output 3 sangat sedikit dan banyak digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Output 1.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Guna melaksanakan analisis lanjutan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, Asisten Deputi Bidang Perhubungan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor: 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, pengukuran capaian kinerja juga dilihat melalui pengukuran capaian *output* yang dilakukan dengan membandingkan Target Volume Keluaran/Output (TVK) yang direncanakan dalam RKA-KL/DIPA, dibandingkan dengan Realisasi Volume Kegiatan (RVK), serta membandingkan antara Target Indikator Keluaran Kegiatan (TIKK) dengan Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (RIKK).

Tabel 9 : Matriks Capaian Keluaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Capaian Keluaran Kegiatan (CKK)	Volume		Indikator Keluaran Kegiatan		
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	IKK	Target (TIKK)	Realisasi (RIKK)
Rancangan	154	223	IKK 1	128	180

Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan			IKK 2	10	28
			IKK 3	16	15

Pada tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Perhubungan menghasilkan 223 volume keluaran/output (RVK) melalui 1 kegiatan, yaitu Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan.

$$CKK = \prod_{i=1}^m \left(\left(\frac{RVK \text{ ke } i}{TVK \text{ ke } i} \right) \times \left(\prod_{j=1}^n \frac{Realisasi indikator_i}{Target indikator_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Gambar 11 : Formula Penghitungan Evaluasi Output Kegiatan

Keterangan:

CKK : Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan

RVK : Realisasi Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan

TVK : Target volume Keluaran (*Output*) Kegiatan

m : Jumlah keluaran (*Output*) Kegiatan

n : Jumlah indikator keluaran (*Output*) Kegiatan

Berdasarkan formula pada Gambar 11, didapati bahwa rasio Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan (CKK) Asisten Deputi Bidang Perhubungan pada tahun 2019 adalah 223,79%.

$$P = \frac{RA}{PA}$$

Gambar 12 : Formula Penghitungan Penyerapan Anggaran

Keterangan:

P : Penyerapan anggaran

RA : Akumulasi realisasi anggaran

PA : Akumulasi pagu anggaran

Berdasarkan formula pada Gambar 12, rasio penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan tahun 2019 adalah sebesar 0,98.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Gambar 13 : Formula Penghitungan Evaluasi Kinerja Anggaran

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Terhadap nilai CKK sebesar 223,79% dilakukan analisis lebih lanjut terhadap kinerja anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dengan menggunakan formula evaluasi kinerja anggaran (Gambar 13). Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, diperoleh bahwa capaian efisiensi Asisten Deputi Bidang Perhubungan tahun 2019 adalah sebesar 55,90%. Mengingat kriteria penilaian efisiensi adalah $-20\% \geq E \geq 20\%$, maka perlu dilakukan penyesuaian efisiensi, sehingga nilai efisiensi Asisten Deputi Bidang Perhubungan untuk tahun 2019 adalah 100 %. Lebih sederhana, jika rasio capaian menunjukkan angka yang lebih besar dari rasio penyerapan anggaran maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi efisiensi. Asisten Deputi Bidang Perhubungan memiliki rasio capaian sebesar 1,94 dan rasio penyerapan anggaran 0,98 serta didukung dengan formula penghitungan efisiensi, maka dapat disimpulkan bahwa indikator output telah dilaksanakan dengan efisien.

Lebih lanjut dilakukan analisa perbandingan antara jumlah capaian outcome dengan jumlah sumber daya manusia. Menggunakan metode tersebut dapat dilihat analisa beban kerja setiap pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah outcome Asisten Deputi Bidang Perhubungan sebanyak 223 rekomendasi dengan jumlah pejabat/pegawai berjumlah 11 orang. Dengan dilakukan rasio sederhana, dapat dilihat bahwa setiap pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan memiliki kontribusi ± 20 rekomendasi

PENUTUP

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan tahun 2019 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan kebijakan manajemen kabinet di bidang perhubungan yang tertuang dalam indikator kinerja utama Asisten Deputi Bidang Perhubungan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan Asisten Deputi Bidang Perhubungan secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan. Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi sebagian juga ada yang masih berada di bawah target. Hasil dari laporan kinerja organisasi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan tahun yang akan datang

1. Kesimpulan

Target Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Sekretariat Kabinet, tercapai dengan baik (capaian outcome 100%) dengan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 223 rekomendasi. Dengan realisasi anggaran sebesar 98,68%, menunjukkan kinerja penggunaan anggaran yang cukup baik. Jika dilakukan perbandingan antara output dan realisasi anggaran, menghasilkan bahwa pada tahun ini untuk menghasilkan 1 output membutuhkan dana sebesar Rp 4.646.667.

Dengan menggunakan metode analisa sebagaimana diatur oleh Kementerian Keuangan, penggunaan sumber daya anggaran di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah mendapat nilai efektif. Untuk analisis beban kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan, disimpulkan bahwa setiap pejabat/pegawai bertanggungjawab dan berkontribusi terhadap ± 20 rekomendasi yang telah disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

2. Saran

Pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan tidak terlepas dari kerja keras dan kerja sama seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan khususnya dan Deputi Bidang Kemaritiman pada umumnya. Pencapaian kinerja yang baik oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan perlu diiringi dengan usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang ada. Sebagai bagian dari usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dan prestasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan perlu mempertimbangkan hasil analisis SWOT yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, guna pengembangan lebih lanjut Asisten Deputi Bidang Perhubungan menyarankan:

- a. Perlu dilakukan penambahan jumlah SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan, mengingat beban kerja setiap pejabat/pegawai yang cukup tinggi. Selain itu, pejabat yang akan memasuki masa pensiun juga dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk penambahan jumlah SDM;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana kantor yang memadai dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sarana dan prasarana pengolahan data dan sistem teknologi informasi;
- c. Penerapan kaidah perencanaan yang tepat dapat mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dengan keterbatasan yang ada.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hennie Ambar Susilowati, S.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perhubungan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman

Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Hennie Ambar Susilowati, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan	Rp.833.923.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan	Rp.62.093.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perhubungan	Rp.153.984.000,-
Total Anggaran	Rp.1.050.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman


Ir. Agustina Murbaningah, M.Si.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan


Hennie Ambâr Susilowati, S.H.

2. Data Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Perhubungan

No.	Nama Lengkap	NIP	Golongan	Pangkat	Jabatan
1	Hennie Ambar Susilowati, S.H.	19730516 199903 2 001	IV/b	Pembina Tk. I	Asisten Deputi Bidang Bidang Perhubungan
2	M. Faisal Yusuf, S.IP., M.Si.	19741127 200501 1 010	IV/b	Pembina Tk. I	Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian
3	Romi Fajar Ali, S.H., M.H.	19880424 201012 1 006	III/c	Penata	Kepala Subbidang Transportasi Darat
4	Mela Meilania, S.AP.	19810525 200912 2 002	III/c	Penata	Kepala Subbidang Transportasi Perkeretaapian
5	Radian Nurcahyo, S.H., M.Kn., LL.M.	19731212 200212 1 001	IV/b	Pembina Tk. I	Kepala Bidang Perhubungan Laut
6	Benni Kusriyadi, S.ST.	19830701 200501 1 001	III/c	Penata	Kepala Subbidang Kepelabuhan
7	Muhammad Eky Marzuki, S.E.	19890209 201502 1 001	III/b	Penata Muda Tk. I	Analisis Perekonomian pada Subbidang Kepelabuhan
8	Adnan, S.Sos.	19620603 198303 1 003	IV/a	Pembina	Kepala Bidang Perhubungan Udara
9	Rojat, S.Sos., M.H.	19680611 199503 1 001	III/c	Penata	Kepala Subbidang Angkutan dan Bandar Udara
10	Manda Kumoro Saraswati, S.E.	19910205 201502 2 001	III/b	Penata Muda Tk. I	Analisis Perekonomian pada Subbid Angkutan dan Bandar Udara
11	Hami Prabowo, S.E.	19930213 201801 1 001	III/a	Penata Muda	Analisis Perekonomian pada Subbidang Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan
12	Meutia Megah Shinta, S.H.				Pegawai Tidak Tetap pada Asdep Bidang Perhubungan

3. Matriks Capaian Kinerja Asisten Deputy Bidang Perhubungan

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
1	Perkembangan Laporan Kemenko pada Kegiatan tindak lanjut arahan presiden dalam SITAP	1 (2019)	2 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Romi Fajar
2	Laporan perkembangan proyek strategis nasional (psn) provinsi Kalimantan timur	2 (2019)	3 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pengeretaapian	Mela Meilania
3	Briefing sheet sidang kabinet paripurna program dan kegiatan tahun 2019 bidang perhubungan	5 (2019)	7 Januari 2019	Asisten Deputi Bidang Kepariwisata Ristek dan Lingkungan Maritim		8 (2019)	7 Januari 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	ALL		
4	Briefing Sheet Bahan Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	6 (2019)	7 Januari 2019	Asisten Deputi Bidang Kepariwisata Ristek dan Lingkungan Maritim		9 (2019)	7 Januari 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida
5	Laporan hasil rapat kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan program kegiatan perhubungan TA 2019	13 (2019)	9 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Siapkan laporan yang ringkas, kaid bahas dengan saya dan Pak Syaf		11 Januari 2019		OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
6	Permintaan anggota kelompok kerja tim nasional p3dn	14 (2019)	9 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		17 (2019)	11 Januari 2019	Deputi Bidang Perekonomian	OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelakaan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hami Prabowo
7	Tindaklanjut Kegiatan proyek strategis nasional purukcahu-Banguang di provinsi Kalimantan tengah (hasil koordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian dan KPPIP)	16 (2019)	11 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pengeretaapian	Mela Meilania
8	Permohonan Pelepasan Ekspor Kereta PT INKA ke Bangladesh	24 (2019)	18 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Diperbaiki sesuai dengan pembicaraan. Kegiatan sudah lewat, sebaiknya substansi surat mengenai SH kegiatan tersebut		23 Januari 2019		OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pengeretaapian	Mela Meilania

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
9	Data Politik Kebijakan Triwulan I Tahun 2019 dari Bidang Perhubungan	25 (2019)	21 Januari 2019	Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset, Teknologi, dan Lingkungan Maritim		34 (2019)	21 Januari 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	ALL		
10	Laporan menghadiri rapat monitoring dan evaluasi percepatan PSN Sektor perhubungan	26 (2019)	21 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		46 (2019)	25 Januari 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA		Adnan
11	Penyampaian briefing sheet dan bahan rapat tindak lanjut kebijakan pengendalian over dimension over loading (odol)	28 (2019)	22 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pengeretaapian	Nabila Azwida
12	Laporan menghadiri workshop ratifikasi oil pollution preparedness cooperation (oprc) tanggal 10 desember 2018 di bogor	31 (2019)	23 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M Eky Marzuki
13	Laporan hasil rapat koordinasi percepatan pembangunan di wilayah kabupaten tanjung jabung barat, jambi	32 (2019)	23 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M Eky Marzuki
14	Laporan hasil FGD lanjutan terkait submisi Indonesia sebagai observer di arctic council	33 (2019)	23 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
15	Usulan kegiatan tindak lanjut arahan presiden pada rapat terbatas tentang pengelolaan transportasi jabodetabek	36 (2019)	23 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida
16	Penyampaian Artikel "pengelolaan transportasi jabodetabek"	37 (2019)	25 Januari 2019	Asisten deputi bidang humas dan protokol	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida
17	Pengajuan usulan topik sidang kabinet	38 (2019)	25 Januari 2019	Plt. Asisten Deputi Bidang ESDM		50 (2019)	25 Januari 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	ALL		
18	Penyampaian Daftar Acara/Kegiatan Kemenko Bidang Kemaritiman Tahun 2019 yang perlu kehadiran Presiden	39 (2019)	25 Januari 2019	Asisten Deputi Bidang KKP		66 (2019)	1 Februari 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	ALL		
19	Laporan hasil rapat koordinasi sinkronisasi rencana kerja penanggulangan tumpahan minyak di laut tahun 2019	40 (2019)	25 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Transportasi Pengeretaapian	M Eky Marzuki
20	Pemohonan penetapan pperpres tentang pengesahan persetujuan angkutan udara antara pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki terkait angkutan udara berjadwal	41 (2019)	25 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Monitor apakah sudah ditetapkan oleh Presiden		11 Februari 2019		OUTCOME IKK 2	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
21	Laporan menghadiri rapat mengenai implementasi Maritime Labour Convention (MLC) 2006	47 (2019)	25 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
22	Laporan rapat tindak lanjut implementasi kebijakan pengendalian over dimension over loading (odol)	48 (2019)	25 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Agendakan rapat mengundang K/L terkait		25 Januari 2019		OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida
23	Penyampaian bahan rapat tentang infrastruktur di bidang kemaritiman	51 (2019)	29 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		56 (2019)	29 Januari 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	ALL		
24	Dukungan jalan akses terhadap infrastruktur perhubungan	54 (2019)	29 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Gek kemenhub, urgensi pembangunan akses menuju penyeberangan wailley dan waisala, hasil pengecekan dan hasil progres berikutnya dilaporkan		30 Januari 2019		OUTCOME IKK 1	ALL		
25	Penyampaian data politik kebijakan Perhubungan	55 (2019)	29 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		58 (2019)	30 Januari 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	ALL		
26	Pelepasan Ekspor kereta PT. Industri Kereta Api (Persero) ke Bangladesh	56 (2019)	30 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Dimonitor perkembangan ya, acara telah berlangsung		30 Januari 2019		OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pekeretaapian	Mela Meliania
27	Laporan kunjungan kerja dan rapat koordinasi tentang industri dirgantara	57 (2019)	31 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Dapat digunakan sbg bahan analisis kebijakan. Bgmn penggunaan produk PT. DI bagi maskapai nasional		1 Februari 2019		OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Rojat
28	Laporan menghadiri rapat pengembangan bandara I Gusti Ngurah Rai Bali	58 (2019)	31 Januari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman					OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Rojat
29	Laporan Konvensi IMO tentang Tanggung Jawab dan Kompensasi Akibat Pencemaran Laut yang Berasal Dari Kapal	59 (2019)	1 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
30	Surat Mr. Oualid Belaidi tentang Pencarian Pesawat MH-370	60 (2019)	1 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		65 (2019)	1 Februari 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
31	Laporan hasil rapat pembahasan tindak lanjut proses ratifikasi konvensi tentang penandaan bahan peledak plastik untuk maksud penemuan neralan	65 (2019)	7 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Bu Asdep tolong usulan bentuk payung hukum yang tepat		8 Februari 2019		OUTCOME IKK 2	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Harni Prabowo
32	Pengaduan Ethiopian Airlines kepada Pemerintah Indonesia	67 (2019)	7 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		77 (2019)	12 Februari 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
33	Briefing sheet bahan rapat pembahasan transportasi jabodetabek	74 (2019)	11 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Laporkan ke Sesskab rapat dengan Bappenas dan rapat dengan Depmar dengan kepala BPTJ terkait sinergitas kebijakan 3 pemprov/pemda dengan k/l		18 Februari 2019		OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida
34	Laporan hasil rapat koordinasi teknis pelabuhan Makassar Sulawesi Selatan	75 (2019)	11 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
35	Briefing sheet bahan rapat terbalas terkait tarif transportasi udara dan bagasi	77 (2019)	12 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		76 (2019)	12 Februari 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelahiran, dan Pengoperasian Penerbangan	Rojat
36	Bahan masukan terkait permasalahan terhambatnya investasi PT Dizamatra Powerindo terkait ijin interkoneksi jalur perkeretaapian nasional yang belum terselesaikan	78 (2019)	12 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		79 (2019)	13 Februari 2019	Deputi Bidang Perekonomian	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pengeretaapian	Mela Melania
37	Laporan rapat persiapan peresmian pelabuhan kuala tanjung, kereta api bandar tinggi-kuala tanjung serta investasi di KEK Sei Mangkei dan PT Inalum	79 (2019)	12 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Tks, masukkan di memo Deputi ke Sesskab		19 Februari 2019		OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
38	Penyampaian Dokumen Materi Question and Answer Terkait Isu Strategis Bidang Transportasi	81 (2019)	14 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		81 (2019)	15 Februari 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	ALL		
39	Rencana acara/kegiatan peresmian pelabuhan hub internasional kuala tanjung, Sumatera utara	82 (2019)	18 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		85 (2019)	20 Februari 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
40	Usulan kegiatan tindak lanjut arahan presiden pada ratas tentang pengelalaan transportasi jabodetabek	83 (2019)	18 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida
41	Updating perizinan operasionalisasi terminal multi purpose PHI Kuala Tanjung	84 (2019)	19 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESMEN CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
42	Briefing Sheet Rapat koordinasi ruang udara new yogyakarta international airport	85 (2019)	19 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	ok, tks sudah dilaksanakan monitor permasalahan penyesuaian alih fungsi tanah u/ tni atau opsi yg lebih murah lainnya		12 Maret 2019		OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
43	Usulan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden tentang Angkutan Pelayaran Rakyat di Perairan	88 (2019)	19 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
44	Laporan perkembangan tindak lanjut rapat terbatas tentang pengelolaan transportasi labodetabek	89 (2019)	21 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		106 (2019)	28 Februari 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida
45	Penyampaian inventarisasi isu bidang perekonomian pada sub sektor bidang perhubungan	90 (2019)	21 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
46	Pemohonan gedung dan lahan untuk kantor komite nasional keselamatan transportasi (KNKT)	91 (2019)	22 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Dikirim		22 Februari 2019		OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan, dan Pengoperasian Penerbangan	Rojat
47	Bahan Program dan Kegiatan Bidang Perhubungan Tahun 2019	93 (2019)	22 Februari 2019	Asisten Deputi Bidang ESDM	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA		Adnan
48	Laporan hasil rapat koordinasi terkait pendalaman alur pembuatan alur laut baru, area manuver, area lego jangkar serta manajemen alur dengan perambuan sesuai standar internasional	94 (2019)	25 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
49	Laporan hasil menghadiri diskusi tentang peran aktif pt pelabuhan Indonesia.go.id>Indon esia ii pada sektor maritim Indonesia.go.id>Indon esia	95 (2019)	25 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Data-data sebagai bahan referensi		28 Februari 2019		OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
50	Laporan hasil rapat koordinasi ruang udara new yogyakarta international airport	98 (2019)	26 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		107 (2019)	4 Maret 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
51	Laporan lecture series on Indonesia maritime diplomacy: the current challenges	102 (2019)	28 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT		
52	Laporan Seminar Nasional Bidang Maritim, Pengembangan Sains dan	103 (2019)	4 Maret 2019	Asisten Deputi Bidang	Digunakan sebagai bahan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA	Transportasi Pekeretaapian	Mela Meilania

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
	Teknologi Kemaritiman untuk Pembangunan Berkelanjutan			Kepariwisata, Riset, Teknologi, dan Lingkungan Maritim	pertimbangan					APIAN		
53	Usulan kegiatan peresmian bandar udara silampari lubuklinggau, Sumatera selatan	104 (2019)	5 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		110 (2019)	06 Maret 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelalaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
54	Laporan pengendalian keselamatan navigasi terkait anjungan minyak dan gas di perairan Indonesia	106 (2019)	5 Maret 2019	Plt. Asisten Deputi Bidang ESDM	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
55	Permohonan temu ramah induk koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan	109 (2019)	6 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Temui saya u/ mendiskusikan rumusan surat Seskab		12 Maret 2019		OUTCOME IKK 1	LAUT		
56	Laporan rapat tindak lanjut pengelolaan transportasi jabodetabek	110 (2019)	6 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida
57	Laporan Focus Group Discussion (FGD) Pengadaan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam Perspektif Perundang-undangan	117 (2019)	13 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Perkeretaapian	Mela Melania
58	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Pembahasan Rencana Pengusulan Rapat Terbatas Kawasan Ekonomi Industri Terpadu	123 (2019)	14 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
59	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut terkait Pendalaman Alur, Pembuatan Alur Laut Baru, Area Manuver, Area Lego Jangkar serta Manajemen Alur dengan Perambuan Sesuai Standar Internasional	124 (2019)	14 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
60	Laporan Roundtable Discussion Common Future of Korea dan ASEAN: KOICA's Role for the New Southern Policy in Indonesia	125 (2019)	14 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1			
61	Rapat Pembahasan Usulan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat	126 (2019)	14 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
62	Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Integrasi Transportasi Jabodetabek	130 (2019)	19 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida
63	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	132 (2019)	19 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan	119 (2019)	19 Maret 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
64	Perkembangan Rencana Peningkatan Status Pelabuhan Swarangan/Pelabuhan Merjati Pelabuhan Utama	133 (2019)	19 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
65	Penyampaian Bahan Kunjungan ke Lokasi MRT Phase I Lebak Bulus – Bundaran HI	134 (2019)	19 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		123 (2019)	20 Maret 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pengeretaapian	Mela Melania
66	Rapat Pembahasan Usulan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat (PELRA)	136 (2019)	20 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	LAUT		
67	Rapat Pembahasan Usulan Penyusunan Rperpres tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat (Pelra)	143 (2019)	22 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	cek di Keppres produk PP & Perpres apakah belum tercantum, kalau mendasak diselesaikan pada th 2019 agar disiapkan izin prakarsa. Tolong rumusannya di jaga agar Perpres ini dpt di implementasikan (resiko implementasi hrs sudah dikalkulasi).	27 Maret 2019			OUTCOME IKK 2	LAUT		
68	Laporan Rapat Bandara Kediri	144 (2019)	22 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	tambahkan peserta rapat		28 Maret 2019		OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hami Prabowo
69	Permintaan Trayek Tol Laut ke Kab. Halmahera	148 (2019)	22 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		137 (2019)	27 Maret 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	LAUT		
70	Penyampaian Data Capaian Program Daerah	149 (2019)	26 Maret 2017	Pjt Asisten Deputi Bidang ESDM		135 (2019)	26 Maret 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	ALL		
71	Penyampaian Data Capaian Program Daerah	150 (2019)	27 Maret 2017	Pjt Asisten Deputi Bidang ESDM		138 (2019)	27 Maret 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	ALL		
72	Pemohonan Usulan Pemrakarsa	152 (2019)	28 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	LAUT		
73	Inventarisasi Program dan Kegiatan K/L yang Mendukung Pembangunan Sumber Daya Manusia	156 (2019)	29 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian	Hami Prabowo

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
74	Penyampaian Tindak Lanjut Janji Presiden Pada Kunjungan Kerja Presiden dari Bulan Agustus 2016 s.d. Desember 2018	157 (2019)	29 Maret 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
75	Inventarisasi Program dan Kegiatan K/L yang Mendukung Pembangunan Sumber Daya Manusia	156 (2019)	1 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		141 (2019)	02 April 2019	Deputi Bidang Perekonomian	OUTCOME IKK 1	UDARA		Adnan
76	Penyampaian Tindak Lanjut Janji Presiden Pada Kunjungan Kerja Presiden dari Bulan Agustus 2016 s.d. Desember 2018	157 (2019)	1 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Buat pic chart untuk masing-masing kementerian		02 April 2019		OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
77	Laporan Rapat Pembahasan Usulan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat (PELRA) tanggal 28 Maret 2019 dan 2 April 2019	161 (2019)	4 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Tunggu izin prakarsa dari Kemenhub		04 April 2019		OUTCOME IKK 2	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
78	Penyampaian Hasil Inventarisasi Kedeputian Bidang Perekonomian Terkait Tindak Lanjut Janji Presiden Saat Kunjungan Kerja pada Agustus 2016 s.d. Desember 2018	162 (2019)	5 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
79	Laporan Rapat Persiapan Penyelenggaraan Resepsi Diplomatik	164 (2019)	5 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
80	Usulan Rencana Acara/Kegiatan Kementerian Perhubungan Tahun 2019 yang Perlu Dihadiri Presiden	166 (2019)	5 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		146 (2019)	08 April 2019	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
81	Tindak Lanjut Integrasi Transportasi Jabodetabek	169 (2019)	8 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		161 (2019)	22 April 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida
82	Usulan Kegiatan Peresmian Bandar Udara Tijilik Riwut, Kalimantan Tengah	170 (2019)	8 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		147 (2019)	08 April 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
83	Penyampaian Tindak Lanjut Janji Presiden Saat Kunjungan Kerja pada Agustus 2016 s.d. Desember 2018	172 (2019)	8 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
84	Penyampaian Hasil Kajian Terkait Inventarisasi POU Yang Menghambat Program Kerja dan Capaian Target Prioritas Nasional Sektor Perhubungan	176 (2019)	10 April 2019	Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
85	Penyampaian Tindak Lanjut Janji Presiden Saat Kunjungan Kerja Presiden	177 (2019)	11 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		152 (2019)	11 April 2019	Deputi Dukungan Kerja Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelautan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
86	Penyampaian Bahan Pointers FGD Optimalisasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Melalui KPBU	182 (2019)	15 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
87	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Makassar New Port (MNP) dan Pembangunan Kereta Api Makassar – Pare-Pare	184 (2019)	15 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	ditindaklanjuti sesuai catatan saya, prioritaskan pekerjaan ini		15 April 2019		OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
88	Usulan Rapat Koordinasi tentang Tarif Angkutan Penumpang Udara	186 (2016)	16 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	kirim	Und 0297/Martim/04/2019	22 April 2019		OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelautan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
89	Laporan Surat Bupati Nabire Terkait Tindak Lanjut Kunker Presiden	187 (2019)	16 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		158 (2019)	18 April 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA		Adnan
90	Usulan Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	190 (2019)	18 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		159 (2019)	18 April 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 2	LAUT		Chaerul Saleh
91	Bahan Rapat Koordinasi Tarif Angkutan Penumpang Udara	195 (2019)	25 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		178 (2019)	6 Mei 2019	Deputi Bidang Perekonomian	OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelautan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
92	Laporan Rapat Koordinasi dan Site Visit Pelayaran Rakyat	196 (2019)	28 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
93	Usulan Kegiatan Peresmian Bandar Udara Internasional Yogyakarta	198 (2019)	29 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		173 (2019)	2 Mei 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelautan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
94	Permohonan Izin Prakarsa Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat	201 (2019)	29 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		172 (2019)	2 Mei 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 2	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
95	Usulan Rapat Terbatas Persiapan	204 (2019)	30 April	Deputi Bidang		169 (2019)	2 Mei 2019	Sekretaris	OUTCOME	DARAT DAN	Transportasi	Nablia

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
	Angkutan Lebaran 2019/1440H		2019	Kemaritiman				Kabinet	IKK 3	PERKERETA APIAN	Darat	Azwida
96	Penyampaian Laporan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Optimalisasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia Melalui Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Public Private Partnership (PPP) atau yang dikenal dengan istilah kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	206 (2019)	30 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Jadwalkan ulang dengan direktur Bappenas	3 Mei 2019			OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
97	Penyampaian Bahan Paparan Pembangunan Infrastruktur Dan Standarisasi Operasional Pelabuhan	205 (2019)	30 April 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
98	Penyampaian Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih Terhadap Artikel "Ngilimu Hutang Berhutang"	208 (2019)	2 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pekeretaapian Angkutan Laut	Mela Meilania
99	Laporan Rapat Koordinasi Tarif Angkutan Penumpang Udara	209 (2010)	2 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		171 (2019)	2 Mei 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hami Prabowo
100	Penyampaian bahan paparan Rapat Evaluasi Tol Laut	210 (2019)	2 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
101	Briefing Sheet dan Infografis Ratas Persiapan Idul Fitri 1440H/2019H	211 (2019)	2 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		174 (2019)	2 Mei 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida
102	Laporan mengikuti Kunker Anggota Komisi II DPR RI	212 (2019)	2 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	untuk terlalu lama masalah DPT sudah lewat pemilu, pilpres sudah selesai pencoblosan (DPT ada masalah apa dengan hasil pileg atau pilgrea)	7 Mei 2019			OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hami Prabowo
103	Tindak Lanjut Arahan Presiden pada SKP/Ratas tentang Perkembangan Pembangunan PLTSa	217 (2019)	8 Mei 2019	Plt. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					OUTPUT IKK 1			
104	Hasil Rapat Pembahasan Aspirasi Daerah Yang Perlu Mendapatkan Dukungan dari Pemerintah Pusat	218 (2019)	9 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		B.0344- 0345/Maritim/ 05/2019	16 Mei 2019	Deputi Kementerian PPN/Bappena s	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN		M. Faisal Yusuf

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
105	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PSN di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	220 (2019)	9 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	dikomunikasikan dg dep ekon, u/ awal identifikasi masalah kita bersama tapi u/ debottlenecking sesuai tuisi asdep-3 maka kita yg lead	13 Mei 2019			OUTCOME IKK 1	UDARA		Adnan
106	Laporan Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program Tol Laut	223 (2019)	9 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan	B.0412/Maritim/05/2019	13 Juni 2019	Kemenko Maritim, Kemendag	OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
107	Reaktivasi Kereta Api Semarang-Lasem	224 (2019)	9 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		188 (2019)	10 Mei 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pekeretaapian	Mela Meilania
108	Laporan Rapat Koordinasi Penyusunan Kerangka Implementasi Short Sea Shipping	225 (2019)	10 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
109	Laporan Menghadiri FGD Pembangunan Infrastruktur dan Standarisasi Operasional Pelabuhan	226 (2019)	10 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
110	Permasalahan Tarif Angkutan Tol Laut di Kabupaten Anambas	229 (2019)	13 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
111	Permohonan Penetapan Perpres tentang Pengesahan Persetujuan Antara Indonesia dan Dewan Federal Swiss terkait Angkutan Udara Berjadwal	230 (2019)	13 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelainan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
112	Penyampaian Bahan Kegiatan Koordinasi dengan PT. KAI terkait perkembangan dan perencanaan bisnis terhadap proyek perkeretaapian yang sedang ditangani dan persiapan menghadapi Idul Fitri 1440H/2019M	234 (2019)	15 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pekeretaapian	Mela Meilania
113	Laporan Rapat Pembahasan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat (PELRA)	239 (2019)	21 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
114	Briefing sheet rapat tindak lanjut arahan Presiden pada ratas tentang persiapan menghadapi idul fitri 1440H/2019M	243 (2019)	22 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida
115	Buku rekam jejak Kementerian Perhubungan tahun 2018	245 (2019)	23 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelainan, dan Pengoperasian	Rojat

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO. TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
116	Laporan hasil koordinasi dengan PT. KAI terkait perkembangan dan perencanaan bisnis terhadap proyek-proyek perkeretaapian yang sedang ditangani serta persiapan menghadapi Idul Fitri 1440H/2019M	246 (2019)	23 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Perkeretaapian	Mela Meilania
117	Laporan perkembangan kebijakan tiket pesawat udara	247 (2019)	24 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
118	Laporan tindak lanjut Arahan Presiden pada ratas tentang persiapan menghadapi Idul Fitri 1440H/2019M	249 (2019)	28 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		198 (2019)	24 Mei 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida
119	Penyampaian hasil harmonisasi Rperpres RI dengan Ethiopia dan RI dengan Qatar untuk angkutan udara	251 (2019)	29 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
120	Permohonan persetujuan kegiatan FGD konektivitas transportasi dengan kawasan perkotaan dan KSPN	253 (2019)	29 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Tgl 21-22 digunakan utk persiapan FGD. FGD tersebut dilaksanakan setelah tanggal tersebut, juni awal		10 Juni 2019		OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
121	Permohonan penetapan Rperpres persetujuan antara RI dan Argentina tentang pengesahan persetujuan angkutan udara	254 (2019)	31 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Ok, dimonitor		10 Juni 2019		OUTCOME IKK 2	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
122	Laporan tindak lanjut ratas tentang pendidikan dan pelatihan vokasi	255 (2019)	31 Mei 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Perkeretaapian	Mela Meilania
123	Briefing Sheet Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Aspirasi Daerah	258 (2019)	11 Juni 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
124	Hasil rapat koordinasi aspirasi daerah yang belum dialokasikan pembiayaannya pada APBN 2019 dan 2020	261 (2019)	13 Juni 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
125	Laporan penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2019 periode h-7 s.d. h-2	266 (2019)	14 Juni 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		226 (2019)	17 Juni 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
126	Laporan Dewan Ketahanan Nasional Mengenai Antisipasi dan Solusi Terhadap Tingginya Angka Korban Jiwa Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (Jalan) Dalam Rangka Ketahanan Nasional	267 (2019)	14 Juni 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	menkomaritim (p deputi ridwan) sudah melaporkan ke seskab, supaya seskab yang melead untuk penyelesaian masalah ini, asdep-3 agar menindaklanjuti dengan menggunakan anggaran yang ada sampai pada kesimpulan hal hal yang perlu dibenahi apa dan siapa berbuat apa		17 Juni 2019		OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pekeretaapian	Mela Mellania
127	Briefing Sheet Rapat terkait Pendidikan dan Pelatihan	272 (2019)	18 Juni 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pekeretaapian	Mela Mellania
128	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami dan Penghwalang Tsunami di Yogyakarta International Airport (YIA)	274 (2019)	18 Juni 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
129	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Pelaksanaan Program Tol Laut dan Jembatan Udara	276 (2019)	19 Juni 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
130	Laporan rapat tindak lanjut Ratas terkait pendidikan dan pelatihan vokasi sektor perhubungan	277 (2019)	25 Juni 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pekeretaapian	Mela Mellania
131	Briefing Sheet rapat intern pelabuhan Patimban	279 (2019)	25 Juni 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		232 (2019)	24 Juni 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
132	Permohonan data terkait perjanjian internasional di bidang perhubungan	B 0642 (2019)	28 Juni 2019	Ka Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelenbagaan Internasional Kemenhub	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
133	Perkembangan Realignment Flight Information Region (FIR)	284 (2019)	2 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		254 (2019)	10 Juli 2019	Deputi Bidang Polhukam	OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, dan Kelalkan, dan Pengoperasian	Rojat

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO. TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
134	Permohonan Izin Prakarsa Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Bagi Anggota Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli Mahkamah Pelajaran	285 (2019)	2 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusiyadi
135	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami Dan Penghalang Tsunami Di Yogyakarta International Airport (YIA)	286 (2019)	2 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hami Prabowo
136	Laporan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2019 (1440 H)	287 (2019)	2 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	ALL		
137	Perkembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Bandara Kertajati)	289 (2019)	3 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		246 (2019)	4 Juli 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
138	Laporan Menghadiri Rapat Persiapan Penyelenggaraan Resepsi Diplomantik IMO	296 (2019)	4 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
139	Penyampaian Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Tahun 2019	298 (2019)	4 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		242 (2019)	4 Juli 2019	Deputi Bidang Polhukam	OUTCOME IKK 3	ALL		
140	Laporan Rapat Koordinasi Tentang Tata Kelola Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	302 (2019)	5 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Romi Fajar
141	Penyampaian Profil Negara Korea Utara Dan Ekuador Dalam Acara Resepsi Diplomantik Penggalangan Dukungan Suara Kategori C Imo	304 (2019)	8 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
142	Penyampaian Tindak Lanjut Rencana Aksi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat	305 (2019)	8 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		250 (2019)	9 Juli 2019	Deputi Bidang Polhukam	OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hami Prabowo
143	Laporan Perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Kalimantan Timur Semester I TA 2019	312 (2019)	11 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Nabila Azwida
144	Perkembangan Kebijakan Tiket Pesawat Udara	313 (2019)	11 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
145	Laporan Hasil Rapat Koordinasi terkait Jaminan Keselamatan Pelayaran pada Penerapan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok	315 (2019)	12 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
146	Laporan Penyelesaian	326 (2019)	18 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan	270 (2019)	19 Juli 2019	Sekretaris	OUTCOME	UDARA	Angkutan dan	Manda

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
	Permasalahan Tarif Angkutan Penumpang Udara			Kemaritiman	sebagai bahan pertimbangan			Kabinet	IKK 1		Bandar Udara	Kumoro
147	Laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Ratas tentang Percepatan Pembangunan Jawa Tengah dan Jawa Timur	327 (2019)	19 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Diperbaiki bersama Asdep 4 & koordinasi dengan Dep Ekon		29 Juli 2019		OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Romi Fajar
148	Penyampaian Data Hasil Pemetaan Arah Presiden	337 (2019)	31 Juli 2019	Plt. Asisten Deputi Bidang ESDM		457 (2019)	31 Juli 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	OUTCOME IKK 1	ALL		
149	Laporan Menghadiri Rapat Pembahasan Ratifikasi Oil Pollution Preparedness Co- operation (OPRC)	338 (2019)	1 Agustus 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut	Benni Kusriyadi
150	Penyampaian Ucapan Selamat atas Terpilihnya Kembali Menjadi Presiden RI dan Permohonan Audiensi dengan Presiden dari Vice Chairman GVK Power and Infrastructure (Mr. G V Sanjay Reddy) untuk Menyampaikan Ketertarikan Berinvestasi di Indonesia	339 (2019)	2 Agustus 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		589 (2019)	6 Agustus 2019	BKPM dan Kemenuh	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pekertaaipan	Mela Meilania
151	Penyampaian Matriks Ringkasan Janji Presiden	342 (2019)	2 Agustus 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		286 (2019)	6 Agustus 2019	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	OUTCOME IKK 1	ALL		
152	Laporan Rapat Koordinasi "Pengembangan Infrastruktur Transportasi Untuk Mendukung Konektivitas Destinasi Pariwisata Borobudur dan Destinasi Penyanga (Geopark Gunung Sewu) Guna Bangkitan Penumpang Yogyakarta International Airport"	343 (2019)	2 Agustus 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		307 (2019)	22 Agustus 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
153	Permintaan Kunjungan Kehormatan Secretary of Ho Chi Minh City Party Committee, Vietnam	349 (2019)	7 Agustus 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		295 (2019)	8 Agustus 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pekertaaipan	Mela Meilania
154	Penyampaian Matriks Capaian Pengasan Kepada Sekretaris Kabinet dalam Penyusunan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden Periode Oktober 2014 – Juni 2019	351 (2019)	8 Agustus 2019	Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan		294 (2019)	8 Agustus 2019	Deputi Bidang PMK	OUTCOME IKK 1	ALL		
155	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Bidang Perindustrian Perdagangan, Logistik, Transportasi dan Keblakan	353 (2019)	9 Agustus 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepeleabuhanan	M. Eky Marzuki

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
	Peraturan untuk mendukung Program Integrated Port Network di Bandung, Jawa Barat											
156	Penyampaian Bahan Keynote Speaker Sekretaris Kabinet pada Acara HUT ke-44 BPPT	355 (2019)	9 Agustus 2019	Plt. Asisten Deputi Bidang ESDM		301 (2019)	15 Agustus 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pakeretaapian	Mela Mellania
157	Laporan menghadiri rapat pembahasan Rperpres tentang Hak Keuangan bagi anggota panel ahli dan sekretaris tim panel ahli mahkamah pelayaran	357 (2019)	15 Agustus 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Dimonitor tindak lanjutnya		15 Agustus 2019		OUTCOME IKK 2	LAUT	Kepelabuhanan	Benni Kusriyadi
158	Rencana Operasi Terbatas Landas Pacu Ketiga Bandara Soekarno-Hatta	362 (2019)	19 Agustus 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		310 (2019)	26 Agustus 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaitkan, dan Pengoperasian Penerbangan	Rojat
159	Laporan FGD Kerangka Kebijakan Regulasi Partisipasi Swasta Dalam Pembiayaan Infrastruktur Guna Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur	367 (2019)	23 Agustus 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	Benni Kusriyadi
160	Penyampaian Bahan Rapat Tindak Lanjut Perkembangan Perpres Nomor 81 Tahun 2018	369 (2019)	23 Agustus 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	Benni Kusriyadi
161	Laporan Rapat Penyusunan Rancangan Perpres tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat	370 (2019)	23 Agustus 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	LAUT	Kepelabuhanan	Benni Kusriyadi
162	Rencana Pembangunan Pelabuhan Internasional Maritain di Kab. Alor NTT	371 (2019)	23 Agustus 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
163	Laporan progress ratifikasi Konvensi Nairobi 2007 dan pembentukan tim panitia antar kementerian (PAK)	372 (2019)	28 Agustus 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	LAUT	Kepelabuhanan	Benni Kusriyadi
164	Laporan tindak lanjut perkembangan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008	375 (2019)	28 Agustus 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	Benni Kusriyadi
165	Peninjauan dan take off dari landas pacu 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta	377 (2019)	29 Agustus 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
166	Laporan Rapat Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK dalam Rangka Pemantauan Perkembangan Pembangunan KEK Bitung, Morotai, dan Maloy Batuta Trans Kalimantan	395 (2019)	9 September 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT		Radian Nurcahyo

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
167	Usulan Larangan Pengoperasian Kendaraan ODOL Bagi Proyek-Proyek Pemerintah dan BUMN	400 (2019)	11 September 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pengeretaapian	Mela Meilania
168	Laporan Rapat Koordinasi Kompilasi, Validasi, dan Pemutakhiran Usulan Program/Kegiatan Prioritas Dalam Rangka Penyusunan Master List Percepatan Pembangunan Jawa Tengah	406 (2019)	16 September 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		339 (2019)	16 September 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	ALL		
169	Permohonan Penetapan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Demokratik Federal Ethiopia tentang Angkutan Udara RPerpres tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar untuk Angkutan Udara	411 (2019)	18 September 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Tks. Monitor perkembangannya		19 September 2019		OUTCOME IKK 2	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
170	Permohonan Audiensi Gubernur Sulawesi Barat Kepada Presiden	413 (2019)	19 September 2019	Plh. Deputi Bidang Kemaritiman		343 (2019)	20 September 2019		OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pengeretaapian	Mela Meilania
171	Penyampaian Ucapan Selamat atas Terpilihnya Kembali Menjadi Presiden RI dan Permohonan Audiensi dengan Presiden dari Vice Chairman GVK Power and Infrastructure (Mr. G V Sanjay Reddy) untuk Menyampaikan Keterlibatan Berinvestasi di Indonesia	414 (2019)	19 September 2019	Plh. Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pengeretaapian	Mela Meilania
172	Laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengembangan DPN Solo-Sangiran	415 (2019)	19 September 2019	Plh. Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Romi Fajar
173	Sosialisasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	416 (2019)	19 September 2019	Plh. Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Rojat
174	Briefing Sheet rapat tim POKJA Bidang pemantauan implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)	421 (2019)	25 September 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Rojat
175	Penyampaian briefing sheet rapat validasi usulan program/kegiatan prioritas dalam rangka penyusunan master plan percepatan pembangunan wilayah provinsi Jawa Tengah	422 (2019)	25 September 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Ok		25 September 2019		OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelalkan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO. TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
176	Laporan Kegiatan FGD dampak pembangunan infrastruktur untuk mempercepat investasi dan pemerataan pembangunan ekonomi	423 (2019)	27 September 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Miniakan paparan narasumber lainnya		3 Oktober 2019		OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Rojat
177	Penyampaian Briefing Sheet FGD roadmap penguatan konektivitas dan sistem logistik provinsi Jawa tengah	425 (2019)	30 September 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelalaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
178	Matrik Janji Presiden pada Acara Resmi Kenegaraan dan Kunjungan Kerja Bulan Agustus 2019	438 (2019)	9 Oktober 2019	Asdep KP	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	ALL		
179	Surat Direktur Chester View Limited	439 (2019)	9 Oktober 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		366 (2019)	11 Oktober 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
180	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi Tim Kelompok Kerja Pemantauan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim Pokja Pemantauan P3DN)	440 (2019)	9 Oktober 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Rojat
181	Permohonan Dukungan Terhadap Bandar Udara Kabupaten Pulau Morotai	441 (2019)	9 Oktober 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		379 (2019)	28 Oktober 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
182	Permohonan Kehadiran Presiden dalam Pengoperasian Perdana Tunnel Boring Machine (TBM) pada Proyek Kereta Api Cepat Indonesia Jakarta-Bandung di Tunnel I Halim	443 (2019)	10 Oktober 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		361 (2019)	10 Oktober 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pekeretaapian	Mela Melania
183	Laporan Kegiatan Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RP-JMN 2020-2024, Wilayah Maluku-Papua	445 (2019)	10 Oktober 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	Benni Kusriyadi
184	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang	446 (2019)	10 Oktober 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		362 (2019)	11 Oktober 2019	Deputi Bidang Perekonomian	OUTCOME IKK 2	ALL		
185	Penyampaian Bahan Rapat Koordinasi Terkait Progres Pembangunan KA Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan KA Bandara Adi Soemarmo Solo	448 (2019)	11 Oktober 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pekeretaapian	Mela Melania

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
186	Laporan rapat koordinasi pembahasan progres pembangunan KA bandara YIA dan KA bandara Adi Soemarmo Solo	454 (2019)	21 Oktober 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	agendakan rapat u/ menindaklanjuti kesepakatan rapat progres u/ pengamanan bandara YIA dr tsunami.		28 Oktober 2019		OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pengeretaapian	Mela Mellania
187	Laporan rapat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat (Peira)	455 (2019)	21 Oktober 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	masih banyak yg harus disempurnakan tolong u/ finalisasi Rperpres jangan levelnya Kasubid Asdep yg bertanggung jawab.		28 Oktober 2019		OUTCOME IKK 2	LAUT	Kepelabuhanan	Benni Kusriyadi
188	Penyampaian surat tindak lanjut atas Arahan Presiden	461 (2019)	23 Oktober 2019	Asdep Kepariwisata, Ristek, dan Lingkungan Maritim	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	ALL		
189	Laporan rapat koordinasi tindak lanjut penetapan alur di Kawasan Segitiga Karang	465 (2019)	25 Oktober 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Asdep 3 tks. Asdep 1 ditindaklanjuti dengan percepatan peta di bidang kemaritiman		6 November 2019		OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
190	Laporan rapat koordinasi percepatan pembangunan bandara kediri	467 (2019)	25 Oktober 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Dorong RTRW Kediri saja, sulit untuk perubahan pp 13/2017		6 November 2019		OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Rojat
191	Pernyampaian Audiensi Head of Region Asia-Pacific Airbus Defence and Space dengan Sekretaris Kabinet	474 (2019)	29 Oktober 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		385 (2019)	29 Oktober 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
192	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas tentang Program dan Kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	474a (2019)	30 Oktober 2019	Pit. Asisten Deputi Bidang ESDM		389 (2019)	30 Oktober 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	ALL		
193	Laporan Rapat Pengesahan The Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi Tentang Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007)	478 (2019)	31 Oktober 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
194	Briefing Sheet Rapat Koordinasi Terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru	487 (2019)	6 November 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
195	Laporan Rapat Koordinasi Impor Kapal Aqua Blu	490 (2019)	11 November 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	Benni Kusriyadi
196	Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Permendag No. 76 Tahun 2019)	491 (2019)	12 November 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	LAUT	Transportasi Darat	Romi Fajar
197	Laporan Rapat Pengesahan The Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi Tentang Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007)	494 (2019)	14 November 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Untuk diringkas oleh Asdep 1, persiapan untuk IMO		14 November 2019		OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
198	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Mitigasi Bencana di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta	495 (2019)	14 November 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		B.1000/Manti m/Setkab/11/2 019 406 (2019)	26 November 2019 '19 November 2019	KL	OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
199	Perkembangan Dukungan Transportasi di Maluku Utara	496 (2019)	15 November 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		1085 (2019)	25 November 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Romi Fajar
200	Hasil Dialog Publik "Menjawab Tantangan Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum"	497 (2019)	15 November 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Dibuat memo ke Seskab yang ringkas		21 November 2019		OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	Benni Kusriyadi
201	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Pusat Logistik Berbasis Kereta Api (Lookman Djaja), tanggal 19 November 2019	509 (2019)	20 November 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
202	Permohonan Audiensi Badan Pekerja Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)	511 (2019)	21 November 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		423 (2019)	26 November 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Romi Fajar
203	Penyampaian Ucapan Selamat atas Terpilihnya Kembali Menjadi Presiden RI dan Permohonan Audiensi dengan Presiden dari Vice Chairman GVK Power and	515 (2019)	25 November 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Pekeretaapian	Mela Melania

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO. TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
	Infrastructure (Mr. G V Sanjay Reddy) untuk Menyampaikan Ketertarikan Berinvestasi di Indonesia											
204	Permohonan Pembangunan Kereta Api Banda Aceh - Besitang	516 (2019)	25 November 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		446 (2019)	13 Desember 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA API/AN	Transportasi Pekertaapian	Mela Meilania
205	Laporan Rapat Koordinasi Penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terencil, Terluar dan Perbatasan (Perpres No. 70 Tahun 2017)	517 (2019)	27 November 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	LAUT	Kepelabuhanan	Benni Kusriyadi
206	Penyampaian Bahan Terkait Permohonan Audiensi oleh Indonesia Nasional Shipowner Association (INSA), Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), Indonesia Nasional Shipowner Association (INSA), dan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP)	521 (2019)	27 November 2019	Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA API/AN	Transportasi Darat	Romi Fajar
207	Permohonan Director General & CEO International Air Transport Association Untuk Bertemu Dengan Presiden	523 (2019)	27 November 2019	Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Ristek, dan Lingkungan Maritim		429 (2019)	28 November 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
208	Briefing Sheet Kunjungan Presiden ke Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat	529 (2019)	28 November 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 3	LAUT	Kepelabuhanan	Benni Kusriyadi
209	Penyampaian Briefing Sheet Audiensi Presiden dengan Indonesian National Shipowners Association (INSA)	534 (2019)	3 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		430 (2019)	3 Desember 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	LAUT	Kepelabuhanan	M. Eky Marzuki
210	Penyampaian Buku Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan Tahun 2018	535 (2019)	4 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		439 (2019)	9 Desember 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA API/AN	Transportasi Darat	Romi Fajar
211	Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pemantauan Optimalisasi Operasional Bandar Udara Internasional Jawa	536 (2019)	4 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	siapkan rapat dicari cantulannya hasil		13 Desember 2019		OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
	Barat/BIUB (Bandara Kertajati) Majalengka				ratas/blusukan /Janji presiden							
212	Permohonan Audiensi Head of Region Asia-Pacific Airbus Defence and Space dengan Sekretaris Kabinet	546 (2019)	5 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	oke thx		9 Desember 2019		OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Rojat
213	Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau	547 (2019)	9 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	LAUT	Kepelabuhanan	Benni Kusriyadi
214	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur	549 (2019)	10 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan	440 (2019)	10 Desember 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	ALL		
215	Laporan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyelesaian Grand Design Mitigasi Bencana di Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta	551 (2019)	11 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelalaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
216	Briefing Sheet Bahan Rapat Terbatas Persiapan Hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020	553 (2019)	12 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		445 (2019)	13 Desember 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	ALL		
217	Penyampaian Briefing Sheet Sosialisasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah	558 (2019)	16 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan paparan Deputi sebagai narasumber				OUTCOME IKK 1	UDARA	Kenavigasian, Keamanan, Kelalaikan, dan Pengoperasian Penerbangan	Hani Prabowo
218	Permohonan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Polewali Mandar	559 (2019)	16 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		458 (2019)	23 Desember 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
219	Permohonan Izin Prakarsa Ratifikasi Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko	560 (2019)	16 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	UDARA	Angkutan dan Bandar Udara	Manda Kumoro
220	Laporan Sosialisasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019)	566 (2019)	23 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		464 (2019)	30 Desember 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	UDARA	Transportasi Darat	Hani Prabowo
221	Laporan Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Timur	568 (2019)	23 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN		M. Faisal Yusuf
222	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi terkait Peninjauan Kembali dan Revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017	570 (2019)	26 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Romi Fajar
223	Rencana Peresmian Kereta Api Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo	571 (2019)	26 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman		463 (2019)	27 Desember 2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Romi Fajar

No	PERIHAL	NO. TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA	ASSESM ENT CAPAIAN	BIDANG PEMROSES	SUBBIDANG PEMROSES	PIC
224	Permohonan Izin Praktek Pengesahan ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles/CBTP (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Fasilitasi Angkutan Penumpang Lintas Batas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor)	574 (2019)	30 Desember 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Digunakan sebagai bahan pertimbangan				OUTCOME IKK 2	DARAT DAN PERKERETA APIAN	Transportasi Darat	Romi Fajar

4. Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan TA 2019

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen SubKomponen Akun SubAkun Detil
Periode s.d. 31 Desember 2019

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2019 Tgl. 12 Desember 2018

Berdasarkan Kuitansi
Halaman : 1 dari 6

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		1.050.000.000	1.050.000.000	397.725.480	638.481.285	1.036.206.765	98,68	13.793.235
13 DEPUTI MARITIM								
1303 ASDP BIDANG PERHUBUNGAN		1.050.000.000	1.050.000.000	397.725.480	638.481.285	1.036.206.765	98,68	13.793.235
06.5829 DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PERHUBUNGAN		1.050.000.000	1.050.000.000	397.725.480	638.481.285	1.036.206.765	98,68	13.793.235
(01) RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		1.050.000.000	1.050.000.000	397.725.480	638.481.285	1.036.206.765	98,68	13.793.235
001.006 Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Perhubungan		1.050.000.000	1.050.000.000	397.725.480	638.481.285	1.036.206.765	98,68	13.793.235
511 Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan		833.923.000	928.070.000	278.887.980	638.481.285	915.569.265	98,65	12.500.735
511.AA Pengumpulan data		392.744.000	263.207.000	141.205.000	112.822.000	254.027.000	96,51	9.180.000
5212111-RM BELANJA BAHAN		50.000.000	55.890.000	46.805.000	0	46.805.000	83,74	9.085.000
-001		50.000.000	55.890.000	46.805.000	0	46.805.000	83,74	9.085.000
13-03-2019 000018-08/C-01 Euis Damayanti, S.I.A.		0	0	1.650.000	0	0		
Jamuan Januari								
13-03-2019 000022-08/C-01 Euis Damayanti, S.I.A.		0	0	1.455.000	0	0		
Jamuan Januari								
03-05-2019 000053-08/C-01 Euis Damayanti, S.I.A.		0	0	3.720.000	0	0		
Jamuan Maret 2019								
20-05-2019 000067-08/C-01 Euis Damayanti, S.I.A.		0	0	3.150.000	0	0		
Jamuan Maret								
08-07-2019 000087-08/C-01 Euis Damayanti, S.I.A.		0	0	16.065.000	0	0		
Jamuan Mei								
06-12-2019 000130-08/C-01 Euis Damayanti, S.I.A.		0	0	4.485.000	0	0		
Jamuan								
23-12-2019 000171-08/C-01 Euis Damayanti, S.I.A.		0	0	2.975.000	0	0		
Jamuan								
23-12-2019 000173-08/C-01 Euis Damayanti, S.I.A.		0	0	3.900.000	0	0		
Jamuan								
30-12-2019 000188-08/C-01 Euis Damayanti, S.I.A.		0	0	7.045.000	0	0		
Jamuan								
31-12-2019 000215-08/C-01 Euis Damayanti, S.I.A.		0	0	2.360.000	0	0		
Jamuan								
5241111-RM BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA		285.444.000	86.822.000	0	86.822.000	86.822.000	100,00	0
-001		285.444.000	86.822.000	0	86.822.000	86.822.000	100,00	0
29-05-2019 000069-08/D-01 Ir Agustina Murbaningih, M.Si. dkk		0	0	0	79.972.000	79.972.000		
LS Perjadin Mei								

Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat koordinasi dengan PT KAI terkait perkembangan dan perencanaan bisnis terhadap proyek-proyek perkeretaapian yang sedang dtangani serta persiapan menghadapi

		Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
29-10-2019	000213-08/D-01	Mohamad Arief Khumaidi, S.E., M.H. dkk (19 orang)			0	0	6.850.000			
	RDK September	Uang saku RDK Pembahasan tentang Peningkatan Keselamatan dan Keamanan dan Keamanan Transportasi tgl 10 September 2019								
524114-RM		BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA		57.300.000	120.495.000	94.400.000	26.000.000	120.400.000	99,92	95.000
-001										
31-07-2019	000096-08/C-01	Hennie Ambar Susilowati, S.H.		57.300.000	120.495.000	94.400.000	26.000.000	120.400.000	99,92	95.000
	RDK Juli	Uang saku RDK Rapat Pembahasan dan Penyajian bahan Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 3 Juli 2019			0	7.900.000	0			
20-08-2019	000125-08/D-01	Mohamad Arief Khumaidi, S.E., M.H. dkk (15 orang)			0	0	5.650.000			
	RDK Juni	Uang saku RDK Pembahasan dan Penyajian Laporan Hasil Rapat Koordinasi Asuransi Daerah yang Belum Dialokasikan Pembayarnya pada APBN 2019 dan 2020 tgl 13 Juni 2019			0	0	4.650.000			
20-08-2019	000126-08/D-01	M. Falsal Yusuf, S.I.P., M.Si. dkk (12 orang)			0	0				
	RDK Juli	Uang saku RDK Pembahasan dan Penyajian Bahan Rapat Terbatas Percepatan Pembangunan Jawa Tengah tgl 8 Juli 2019			0	4.800.000	0			
27-08-2019	000108-08/C-01	Benni Kusnyadi, S.ST dkk			0					
	Bantrans	Bantuan biaya transportasi Asdep 3 periode Feb-Apr 2019			0		7.950.000			
23-10-2019	000203-08/D-01	Benni Kusnyadi, S.ST dkk			0	0				
	LS Bantrans Juli-Sep	Bantuan biaya transportasi Asdep 3 periode Juli-September 2019			0	0	7.750.000			
05-11-2019	000219-08/D-01	Hennie Ambar Susilowati, S.H. dkk 21 orang			0					
	LS RDK Oktober	Uang saku RDK Program Kegiatan Asdep Bidang Perhubungan untuk bulan Oktober-Desember 2019 tgl 22 Oktober 2019			0	43.000.000	0			
16-12-2019	000139-08/C-01	GRAHAWITA SAMITKA PT			0	7.000.000	0			
	GU Fulliday	Paket Meeting Fulliday dalam rangka koordinasi pemantapan rencana induk pembangunan di kawasan Jawa Tengah tgl 25 dan 28 Oktober 2019			0					
18-12-2019	000148-08/C-01	Hennie Ambar Susilowati, S.H. dkk (19 orang)			0	5.950.000	0			
	GU RDK November	Uang saku RDK Pembahasan dan Penyajian Bahan FGD Keselamatan Transportasi tgl 19 November 2019			0	6.650.000	0			
19-12-2019	000158-08/C-01	M. Falsal Yusuf, S.I.P., M.Si. dkk (16 orang)			0					
	RDK Desember	Uang saku RDK Penyajian Bahan Sosialisasi Perpres Jawa Tengah tgl 4 Desember 2019			0					
19-12-2019	000159-08/C-01	Hennie Ambar Susilowati, S.H. dkk (18 orang)			0					
	RDK Desember	Uang saku RDK Penyajian Laporan Kegiatan Rakor dan Pemantauan Optimalisasi Operasional Bandara Kertajati tgl 3 Desember 2019			0	9.450.000	0			
19-12-2019	000160-08/C-01	M. Falsal Yusuf, S.I.P., M.Si. dkk			0					
	Bantrans	Bantuan transportasi Asdep 3 Periode Okt-Des 2019			0	4.050.000	0			
23-12-2019	000166-08/C-01	Hennie Ambar Susilowati, S.H., Falsal, Rojat, Romi,			0					
	Perjadin Oktober	Perjalanan dinas dalam rangka finalisasi rencana induk percepatan dan pemerataan ekonomi kawasan Jawa Tengah tgl 31 Okt-1 Nov 2019			0					
31-12-2019	000210-08/C-01	Hennie Ambar Susilowati, S.H. dkk (15 orang)			0	5.600.000	0			
	RDK Desember	Uang saku RDK Penyajian Bahan SITAP dan Janji Presiden tgl 23 Desember 2019								
511.AB		Rapat koordinasi/seminar/fgd/kegiatan sejenisnya		441.179.000	664.863.000	137.682.980	523.859.285	661.542.265	99,50	3.320.735
522141-RM		BELANJA SEWA		1.810.000	0	0	0	0	0,00	0
-001										
524119-RM		BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA		1.810.000	664.863.000	137.682.980	523.859.285	661.542.265	99,50	3.320.735
-001										
12-02-2019	000010-08/C-01	Syafruddin, S.H., MH, Adnan, S.Sos, Rojat, S.Sos,			0	9.370.000	0			
	Perjadin Januari	Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan rapat koordinasi tentang pengembangan dan pembangunan industri kerdigintaraan nasional di Bandung, Jabar 29-30 Januari 2019			0		6.457.000			
12-03-2019	000009-08/D-01	Benni Kusnyadi, S.ST			0					
	LS Perjadin Bulan	Perjadin dalam rangka menghadiri FGD Pengendalian Keselamatan Navigasi Terkait Anjungan Minyak dan Gas di Perairan Indonesia di Bali, tanggal 27 Februari-1 Maret 2019, di Bali			0		4.034.900			
18-03-2019	000015-08/D-01	Mela Meliana, A.Md.			0					
	LS Perjadin	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri seminar nasional bidang maritim dengan tema pengembangan sains dan teknologi kemaritiman untuk pembangunan berkelanjutan di Surabaya 23-24 Februari 2019			0	0	10.441.500			
18-03-2019	000016-08/D-01	Hamli Prabowo, S.E.			0					
	LS Perjadin	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri sosialisasi PP No 18/2017 tentang kebijakan ketahanan Indonesia			0					
18-03-2019	000017-08/D-01	Chalrul Saleh, S.H., LL.M.			0					
	LS Perjadin	Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat koordinasi teknis percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta untuk peta dasar dan peta tematik bidang kemaritiman di Hotel Salak Bogor tgl 22-23 Februari 2019			0		1.180.000			

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
26-04-2019	000038-08/D-01	M. Faisal Yusuf, S.IP., M.Si., dan Benni Kusnyadi	0	0	17.943.600			
LS Perjalanin April		Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PSN di Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 8-10 April 2019						
30-04-2019	000046-08/D-01	Romi Fajar Ali, S.H., Benni Kusnyadi, Endang	0	0	25.023.200			
LS Perjalanin April		Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat koordinasi dan site visit pelayaran rakyat, Tanjung pinang, Kep. Riau tgl 21-24 April 2019						
28-05-2019	000065-08/D-01	Adnan, S.Sos., Romi Fajar Ali	0	0	14.189.234			
LS Perjalanin Mei		Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan monitoring dan evaluasi proyek strategis nasional di Prov Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tanggal 1-4 Mei 2019						
28-05-2019	000062-08/D-01	Muhammad Eky Marzuki, S.E.	0	0	10.732.200			
LS Perjalanin April		Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat koordinasi pengembangan marina di Indonesia Bagian Timur di Ambon tanggal 22-24 April 2019						
28-05-2019	000063-08/D-01	Hennie Ambar Susilowati, S.H., Falsal, Adnan, Romi	0	0	4.171.500			
LS Perjalanin April		Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri FGD Pembangunan Infrastruktur dan Standarisasi Operasional Pelabuhan di Bandung tanggal 29-30 April 2019						
28-05-2019	000067-08/D-01	Hani Prabowo, S.E.	0	0	2.447.000			
LS Perjalanin Maret		Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kunjungan kerja komisi II DPR RI ke Prov Banten tanggal 28-30 Maret 2019 di Banten						
25-06-2019	000073-08/D-01	M. Faisal Yusuf, S.IP., M.Si., Benni, Eky	0	0	23.643.000			
LS Juni		Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat koordinasi evaluasi dan optimalisasi rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 terkait program tol laut di Makassar						
16-07-2019	000085-08/D-01	Hennie Ambar Susilowati, S.H., Falsal, Adnan, Romi,	0	0	31.503.851			
RDK Juni		Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat koordinasi evaluasi dan optimalisasi rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 terkait program tol laut di Makassar						
31-07-2019	000096-08/D-02	PT. Antiope Madiju (Hyatt Regency Yogyakarta)	0	0	49.692.000			
LS Fullday		Paket Meeting Fullday dalam rangka Kegiatan FGD dan Rapat Koordinasi tanggal 22 Juli 2019 di Yogyakarta						
01-08-2019	000102-08/D-01	Benni Kusnyadi, S.ST	0	0	4.469.200			
LS Perjalanin Juli		Perjalanan dinas dalam rangka kajian evaluasi dan monitoring atas kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia di Semarang tanggal 24-26 Juli 2019						
05-08-2019	000104-08/D-01	Adnan, S.Sos., Hani	0	0	1.314.000			
LS Perjalanin Juli		Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat koordinasi melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden tanggal 26-27 Juli 2019						
09-08-2019	000110-08/D-01	M. Faisal Yusuf, S.IP., M.Si., Eky, Manda	0	0	8.715.000			
LS Perjalanin Agustus		Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri workshop peningkatan kapasitas aparat dalam bidang perindustrian perdagangan, logistik, transportasi dan kebijakan peraturan untuk mendukung program integrated						
09-08-2019	000111-08/D-01	Hennie Ambar Susilowati,	0	0	42.168.176			
LS Perjalanin Juli		Perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi Pengembangan Infrastruktur Transportasi untuk Mendukung Konektivitas Pariwisata Borobudur dan Destinasi Penyanga (Geopark Gunung Sewu) guna						
13-08-2019	000115-08/D-01	Benni Kusnyadi, S.ST, Romi	0	0	8.963.600			
LS Perjalanin Agustus		Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan FGD Roadmap pembangunan kawasan industri brebes sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah						
19-08-2019	000120-08/D-01	Adnan, S.Sos.	0	0	742.000			
LS Perjalanin Agustus		Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat pembahasan proses notifikasi IMT-GT dan rapat interkem persiapan ratifikasi protocol 3 dan 4 MAPLPAS						
20-08-2019	000134-08/D-01	Rojat, S.Sos.	0	0	6.356.700			
LS Perjalanin Agustus		Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat koordinasi dan peninjauan lapangan konservasi energi dan pemenuhan energi bagi pembangunan daerah di Banyuwangi tgl 7-9 Agustus						
29-08-2019	000143-08/D-01	M. Faisal Yusuf, S.IP., M.Si., Romi	0	0	10.266.332			
LS RDK Agustus		Perjalanan dinas dalam rangka site visit rapat koordinasi pengembangan destinasi prioritas nasional (DPN Solo Sangiran) tgl 18-20 Agustus 2019						
19-09-2019	000161-08/D-01	Benni Kusnyadi, S.ST	0	0	9.679.100			
LS Perjalanin		Perjalanan dinas dalam rangka FGD Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024						
24-09-2019	000168-08/D-01	Hennie Ambar Susilowati, S.H., Falsal, Radian, Romi,	0	0	19.508.462			
LS Perjalanin		Perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi kompilasi dan pemuktahiran program/kegiatan prioritas provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyediaan masterplan percepatan pembangunan provinsi Jawa Tengah						
24-09-2019	000169-08/D-01	M. Faisal Yusuf, S.IP., M.Si., Romi	0	0	8.122.900			
LS Perjalanin		Perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan destinasi prioritas nasiona tgl 15-16 September						
18-10-2019	000188-08/D-01	Radian Nurcahyo, S.H., M.Kn., LL.M., Rojat	0	0	7.517.000			
LS Perjalanin		Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri FGD Kajian Strategi Penajaman Konsep Masterplan Percepatan Pembangunan Perencanaan Provinsi Jawa Tengah tgl 22-23 September 2019						
21-10-2019	000193-08/D-01	Benni Kusnyadi, S.ST, Eky	0	0	14.773.800			
LS Perjalanin Oktober		Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri FGD mengenai dukungan pemerintah dan pelaku usaha untuk optimalisasi pelayanan kuala tanjung sebagai hub internasional						

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
21-10-2019	000194-08/D-01 LS Perjalanin	Hami Prabowo, S.E.	0	0	4.100.300			
29-10-2019	000212-08/D-01 LS Perjalanin	Muhammad Eky Marzuki, S.E.	0	0	3.636.940			
31-10-2019	000216-08/D-01 LS Perjalanin	Hennie Ambar Susilowati, S.H., Adnan, Radian, Romi,	0	0	22.453.466			
18-11-2019	000225-08/D-01 LS Perjalanin	Benni Kusriyadi, S.ST, Eky	0	0	3.220.000			
19-11-2019	000229-08/D-01 LS Perjalanin	Hennie Ambar Susilowati, S.H., Hami, Eky, Rojat, Falsal,	0	0	53.914.180			
19-11-2019	000231-08/D-01 LS Fullday	PT. Antiope Madju (Hyatt Regency Yogyakarta)	0	0	28.500.000			
20-11-2019	000237-08/D-01 LS Perjalanin	Hennie Ambar Susilowati, S.H., Radian, Ahmad Wildan	0	0	10.558.200			
20-11-2019	000242-08/D-01 LS Perjalanin	Radian Nurcahyo, S.H., M.Kh., L.L.M., Romi, Hami	0	0	14.793.600			
21-11-2019	000248-08/D-01 LS Perjalanin	Radian Nurcahyo, S.H., M.Kh., L.L.M., Adnan	0	0	13.642.344			
03-12-2019	000264-08/D-01 LS Perjalanin	Hennie Ambar Susilowati, S.H., radian, falsal, adnan,	0	0	24.985.000			
16-12-2019	000141-08/C-01 GU Fullday	PT. HOTEL SARANA SIKUTINDO	0	21.000.000	0			
16-12-2019	000140-08/C-01 GU Perjalanin	Hennie Ambar Susilowati, S.H., Falsal, Adnan, Radian,	0	42.650.000	0			
23-12-2019	000168-08/C-01 Perjalanin November	M. Falsal Yusuf, S.IP., M.Si., Eky	0	11.185.000	0			
23-12-2019	000167-08/C-01 Perjalanin Desember	Benni Kusriyadi, S.ST	0	6.721.600	0			
30-12-2019	000205-08/C-01 Perjalanin Desember	Hennie Ambar Susilowati, S.H., Radian, Romi, Hami	0	19.886.380	0			
30-12-2019	000207-08/C-01 Perjalanin Desember	M. Falsal Yusuf, S.IP., M.Si., Adnan, Romi, Beni, Eky,	0	26.870.000	0			
524219-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI		0	0	0			
-001			0	0	0			
512	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan		52.550.000	51.300.000	600.000	51.900.000	98,76	650.000
512-AA	Pengumpulan data		62.093.000	51.300.000	600.000	51.900.000	98,76	650.000
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA		15.000.000	0	0	0	0,00	0
-001			0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI		17.700.000	45.800.000	0	45.300.000	98,90	500.000
-001			17.700.000	45.800.000	0	45.300.000	98,90	500.000
14-06-2019	000082-08/C-01 Honorerium	Dr. Ir. Djoko Sasono, Msc. dkk (5 orang)	0	15.700.000	0			
21-08-2019	000105-08/C-01 Honorerium	Honorerium Moderator dan Narasumber, FGD tentang Optimalisasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia melalui Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Public Private Partnership (PPP) pada tanggal 15-16 Prof Arief Rachman dkk (3 orang)	0	12.300.000	0			
		Honorerium Narasumber Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Transportasi untuk Mendukung Konektivitas Destinasi Pariwisata Borobudur dan Destinasi Penyangga guna Bangkitan Penumpang YIA tgl 22						

		Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
19-12-2019	000161-08/C-01	Maria Kristi Endah Murni, Nining Yulistiani				5.700.000	0			
	Honorarium	Honorarium Narasumber dalam rangka Rapat Koordinasi Optimalisasi Operasional Bandar Udara Internasional Jawa Barat tgl 29 November 2019								
23-12-2019	000165-08/C-01	Soerjanto Tjahjono dkk (4 orang)				11.600.000	0			
	Honorarium	Honorarium FGD tentang Peningkatan Keselamatan Transportasi tgl 21-23 November 2019								
524111-RM	-001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA		20.393.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM	-001	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA		20.393.000	0	0	0	0	0,00	0
26-03-2019	000042-08/C-01	Chairul Saleh, S.H., LL.M. dkk.		9.000.000	6.750.000	6.000.000	600.000	6.600.000	97,77	150.000
	Bantrans	Bantuan biaya transportasi Asdep 3 periode Januari 2019								
28-08-2019	000109-08/C-01	Benni Kusnyadi, S.ST dkk		9.000.000	6.750.000	6.000.000	600.000	6.600.000	97,77	150.000
	Bantrans	Bantuan biaya transportasi Asdep 3 periode Jan 2019								
23-10-2019	000202-08/O-01	Benni Kusnyadi, S.ST dkk		9.000.000	6.750.000	6.000.000	600.000	6.600.000	97,77	150.000
	LS Bantrans Juli-Sep	Bantuan biaya transportasi Asdep 3 periode Juli-September 2019								
513	513	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perhubungan		153.984.000	69.380.000	67.537.500	1.200.000	68.737.500	99,07	642.500
513-AA	521211-RM	Pengumpulan Data								
	BELANJA BAHAN									
26-03-2019	000028-08/C-01	Euis Damayanti, S.I.A.		123.334.000	38.730.000	38.237.500	0	38.237.500	96,72	492.500
	Jamuan Februari	Pembayaran Jamuan Rapat Koordinasi Deputi Bidang Kemaritiman tgl 1-15 Februari 2019 - Asdep 3								
31-07-2019	000094-08/C-01	Euis Damayanti, S.I.A.		50.000.000	18.630.000	18.287.500	0	18.287.500	96,16	342.500
	Jamuan Mei-Juni	Pembayaran Jamuan Rapat Koordinasi Deputi Bidang Kemaritiman tgl 16 Mei-28 Jun 2019 - Asdep 3								
04-12-2019	000121-08/C-01	Euis Damayanti, S.I.A.		50.000.000	18.630.000	18.287.500	0	18.287.500	96,16	342.500
	Jamuan	Pembayaran Jamuan Rapat Koordinasi Deputi Bidang Kemaritiman Agustus 2019 - Asdep 3								
524111-RM	-001	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA		48.434.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM	-001	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA		48.434.000	0	0	0	0	0,00	0
28-08-2019	000110-08/C-01	Benni Kusnyadi, S.ST dkk		7.500.000	7.500.000	7.350.000	0	7.350.000	98,00	150.000
	Bantrans	Bantuan biaya transportasi Asdep 3 periode Apr-Jun 2019								
524114-RM	-001	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA		7.500.000	7.500.000	7.350.000	0	7.350.000	98,00	150.000
01-02-2019	000002-08/C-01	Syafruddin, S.H., MH		17.400.000	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	100,00	0
	RDJ Januari 2019	Uang Saku RDJ Pembahasan dan Penyusunan Program Kerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2019, SKP dan SIKT tanggal 11 Januari 2019								
01-02-2019	000001-08/C-01	Syafruddin, S.H., MH		17.400.000	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	100,00	0
	RDJ Januari 2019	Uang Saku RDJ Pembahasan dan Penyusunan Program Kerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2019, SKP dan SIKT tanggal 11 Januari 2019								
513-AB	524114-RM	Rapat koordinasi/seminar/fgd/kegiatan sejenisnya		30.650.000	30.650.000	29.300.000	1.200.000	30.500.000	99,51	150.000
	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA									
12-02-2019	000012-08/C-01	Syafruddin, S.H., MH		30.650.000	30.650.000	29.300.000	1.200.000	30.500.000	99,51	150.000
	RDJ Januari 2019	Uang saku RDJ pembahasan dan penyusunan bahan rapat pengelolaan transportasi Jabodetabek 25 Januari 2019								

		Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
13-03-2019	000015-08/C-01	Hennie Ambar Susilowati, S.H.							
	RDK Februari 2019	Uang saku RDK Pembahasan dan Penyajian Bahan Penanganan Transportasi Jabodetabek 11 Februari 2019		0	5.650.000	0			
03-05-2019	000049-08/C-01	Hennie Ambar Susilowati, S.H. dkk (13 orang)		0	5.000.000	0			
	RDK Maret	Uang saku RDK Pembahasan dan Penyajian Bahan Rapat Koordinasi Integrasi Transportasi Jabodetabek 12 Maret 2019		0	6.400.000	0			
03-05-2019	000050-08/C-01	Hennie Ambar Susilowati, S.H. dkk (17 orang)		0	6.400.000	0			
	RDK Maret	Uang saku RDK Pembahasan Penyajian Bahan Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna/Rapat Terbatas Tahun 2014-2018 21 Maret 2019		0	5.250.000	0			
12-08-2019	000099-08/C-01	M. Faisal Yusuf, S.IP., M.Si. dkk (14 orang)		0	5.250.000	0			
	RDK Mei	Uang saku RDK Rapat Pembahasan dan Penyajian Laporan Hasil Rapat Evaluasi Tol Laut tanggal 2 Mei 2019		0	0	1.200.000			
19-11-2019	000232-08/D-01	Muadz, Wahyuntoro, Tri, Ratna, Joko, Mansyur, Nurmi,		0	0	1.200.000			
	Bantrans	Bantuan biaya transportasi Asdep 3 periode Juli 2019							

5. Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja

- a. Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja Sesuai Surat Edaran Deputy Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018

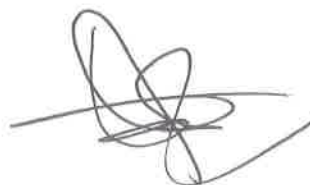
No	Pernyataan	Checklist	Halaman
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	-
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	ii
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	vi
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	45
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	vi
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	39
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	-
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	45
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	-
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah	6

		diyakini keandalannya		
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	✓	15
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	✓	14
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	-
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	✓	16, 45
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	✓	16, 17
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	✓	21

- b. Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja Sesuai Memorandum Deputi Bidang Administrasi Nomor: M.513/Adm/11/2019 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet, Eselon I Dan Eselon II Tahun 2019

No	Pernyataan		Checklist	Halaman
1	BAB I	1. Menambahkan SWOT Analisis pada bagian permasalahan strategis	✓	12
		2. Menampilkan Dashboard SIKT (Menunjukkan Proses Monitoring atas Capaian Kinerja)	✓	5
2	BAB III	1. Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015-2018	✓	21
		2. Analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi) . Contoh LKj Sekretariat Kabinet a. Template grafik perbandingan realisasi anggaran b. Tabel capaian kinerja dan anggaran	✓	39, 22
3	Lampiran	Checklist FO sesuai edaran Depmin	✓	lampiran

Kepala Bidang Fasilitas Operasional
Kedeputian Bidang Kemaritiman



Dra. Sarmini, M.H.

NIP. 19670403 199503 2 001

6. Dokumentasi Beberapa Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan



Gambar 14 : Suasana Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Mitigasi di Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta



Gambar 15 : Asisten Deputi Bidang Perhubungan Melakukan Kunjungan ke Project Site Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta



Gambar 16 : Rapat Koordinasi dengan PT. KAI (Persero) terkait Perkembangan dan Perencanaan Bisnis Terhadap Proyek-Proyek Perkeretaapian yang Sedang Ditangani serta Persiapan Menghadapi Idul Fitri 2019H



Gambar 17 : Tim Panitia Antar Kementerian RPerpres tentang Pengesahan The Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi Tentang Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007)



ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT KABINET

LAPORAN KINERJA

2019

Kontak Kami



Kementerian Sekretariat Negara
Sekretariat Kabinet
Gedung 3, Lantai 4
Jalan Veteran Nomor 18
Jakarta 10110



asdep.perhubungan@setkab.go.id



[@sekretariat.kabinet](https://www.instagram.com/sekretariat.kabinet)